

SKRIPSI

Kepentingan Vietnam dalam Kerjasama ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Tahun 2011 - 2016

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Ilmu Hubungan Internasional



Oleh:

Baron Wisnumurti

135120401111061

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2020





LEMBAR PERSETUJUAN

Kepentingan Vietnam dalam Kerjasama ASEAN

Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) Tahun

2011 - 2016

SKRIPSI

Disusun oleh:

Baron Wisnumurti

NIM. 135120401111061

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama

**Adhi Cahya Fahadayna, S.Hub.Int, M.S.
M.Si**

Pembimbing Pendamping

Lia Nihlah Najwah, S.IP.,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

NIP. 197802202011210

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat rahmat –Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kepentingan Vietnam dalam Kerjasama ASEAN Senior Officials on DrugsMatters (ASOD) Tahun 2011 - 2016”. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan penelitian dan pengerjaan skripsi ini hingga menyelesaikan laporan skripsi yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Semesta yang memberikan dukungan secara spiritual dalam proses pembuatan Penelitian ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Kresno Budidarsono dan Agnes Arsi serta atas dukungan materil dan imateril yang diberikan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan hingga awal sampai akhir.
3. Teman teman Remissa, Rizky Toar, Rufa Hidayat, Rizqtsany yang menemani berkembang di luar kegiatan akademik serta memotifasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Adhi Cahya Fahadayna, S.Hub.Int, M.S. dan Lia Nihlah Najwah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing dan memberikan masukan penulis mulai persiapan pengerjaan skripsi hingga tahap akhir pengerjaan skripsi.
5. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Claudy Clara yang tidak henti-hentinya memberikan segala bentuk support, sebagai pengingat, dan selalu memberikan dukungan moral dalam



proses pengerjaan Skripsi.

6. Penulis mengucapkan Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Himaroki (Himpunan Mahasiswa Rokok dan Kopi) untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi.

7. Terimakasih juga untuk Rekan-rekan Srawung yang memberikan Support dan meminjamkan perabotan dan memberikan dukungan moral selama kegiatan skripsi berlangsung.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, maka dari itu perlunya masukan, saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak untuk Skripsi untuk dapat lebih baik lagi. Selain itu penulis berharap dalam penulisan skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Malang, 30 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini membahas kepentingan Vietnam dalam kerjasama ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) periode 2011-2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan strategi Vietnam dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara serta kontribusinya dalam pengembangan kebijakan bersama. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di bidang narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vietnam memanfaatkan ASOD sebagai platform untuk memperkuat kerjasama regional, mengembangkan kapasitas penegakan hukum, dan memperbaiki strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Vietnam berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan negara-negara anggota ASEAN yang menghadapi ancaman serupa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kerjasama regional tidak hanya meningkatkan respons terhadap masalah narkoba, tetapi juga memperkuat posisi Vietnam dalam tatanan internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kerjasama ASEAN dalam isu-isu narkotika dan peran penting negara anggota dalam upaya kolektif tersebut.

Kata kunci: Vietnam, ASOD, kerjasama ASEAN, narkoba, kebijakan bersama.

**DAFTAR ISI****LEMBAR PERSETUJUAN**

i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

ii

KATA PENGANTAR

iii

ABSTRAK

iv

DAFTAR ISI

vi

BAB I

1

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Rumusan Masalah

8

1.3 Tujuan Penelitian

9

1.4 Manfaat Penelitian

9

BAB II

10

KAJIAN PUSTAKA

10

2.1 Studi Terdahulu

10

2.2 Kerangka Konseptual

12

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional

12

2.2.1.1 Core interests and values

14

2.2.1.2 Middle Range Objectives

18

2.2.1.3 Long Range Goals

22

vi

**OFFICIALS ON DRUG MATTERS TAHUN 2011 – 2016** 51

5.1. Core Interest and Values 52

5.1.2. Defence of Strategical Vital Areas 55

5.1.3. Ethnic, Religious, or Linguistic Unity 57

5.2. Middle Range Objective 59

5.2.1 Private Citizen Interest 59

5.2.2. Stage Prestige 61

5.2.3. Self Extension 63

5.2.4. Promoting Human Right 65

5.3 Long Range Goals 67

BAB VI 69**KESIMPULAN** 69**DAFTAR PUSTAKA** 72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Drugs trafficking menjadi ancaman serius bagi negara di kawasan Asia Tenggara, diperkuat dengan Kawasan Golden Triangle, yang menghubungkan Thailand Utara, Myanmar Timur, dan Laos Barat, merupakan salah satu dari dua kawasan yang dikenal sebagai pusat penanaman, produksi, dan perdagangan opium dunia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, kawasan ini dianggap sebagai produsen opium terbesar di dunia. Selama tahun 1980-an, Myanmar merupakan penghasil opium terbesar, mencapai 700 metrik ton per tahun antara tahun 1981-1987. Diperkirakan pada akhir 1990an, dua per tiga opium dunia (yang kemudian diolah menjadi heroin) ditanam di Asia Tenggara. Sejak Perang Afghanistan pada Oktober 2001 dan keruntuhan rezim Taliban, Afghanistan kembali menjadi produsen opium poppies di dunia. Laos merupakan produsen opium terbesar ketiga di dunia setelah Afghanistan dan Myanmar. Golden Triangle yang diyakini menghasilkan 60 persen opium dan heroin di dunia memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 milyar per tahun.¹

Vietnam merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, ibukota Vietnam adalah Hanoi. Vietnam bernama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia

¹ Devi Anggraini, "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara" diakses dari <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 0.05.



Tenggara. Dengan populasi 97.040.334 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Negara Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi jalur perdagangan tingkat regional maupun internasional.² Salah satu hal menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah *Drugs trafficking*. Secara geografi Vietnam menjadi pintu masuk bagi perdagangan narkoba dunia. Dan menjadi titik penghubung pindahnya heroin dari Laos, Myanmar, dan Cina ke negara-negara Asia lainnya. Menurut data statistik yang dirilis pemerintah, per September 2013, negara yang makin bertumbuh ini mencatat sekitar 180 ribu pecandu. Menurut statistik resmi, pada akhir tahun 2009 di Vietnam, jumlah pecandu baru direkam secara nasional adalah 146.731 orang, turun 26.872 orang dibandingkan dengan akhir tahun 2008 (setara dengan 15,47%). Di mana, jumlah pengguna heroin menyumbang 83, 1%, terkonsentrasi pada usia 30-45 (mewakili 54,2%).³ Pada tahun 1984 ASEAN membentuk Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) yang telah berkomitmen bersama dalam mencegah dan menindak lanjuti kejahatan pengedaran obat-obatan terlarang tersebut.

Kinerja ekonomi Vietnam luar biasa sejak dekade pertama abad kedua puluh satu. Vietnam telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) rata-rata 7,25%, pada 2010 pendapatan rata-rata per kapita mencapai 1.200 US Dolar naik dari kurang dari 400 US Dolar pada tahun 2000. Hanya dalam dua dekade, Vietnam berubah dari ekonomi miskin

² <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html> diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 0.12.

³ <http://www.aipasecretariat.org/wp-content/uploads/2011/09/Vietnam-Country-Report.pdf> diakses pada tanggal 2 april 2019 pada pukul 4.04.

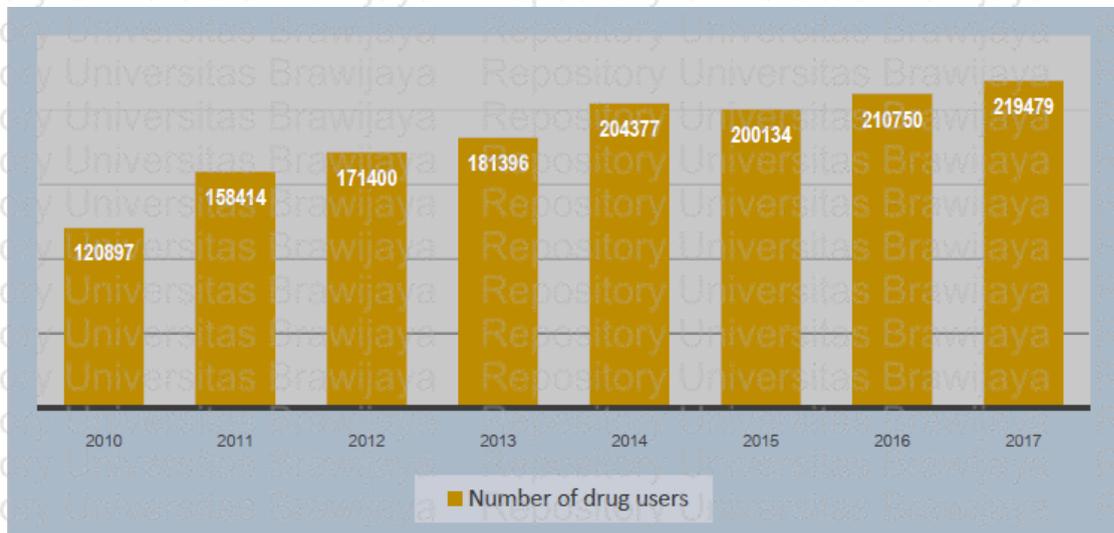


dan terbelakang menjadi status negara berpenghasilan menengah dan memperbaiki kondisi kehidupan jutaan orang. Selain itu, secara umum, Vietnam telah memenuhi sebagian besar Milenium Development Goals. Ketika Vietnam memasuki dekade saat ini, Vietnam memiliki ambisi untuk menjadi negara industri modern, dengan tujuan keseluruhan meningkatkan PDB per kapita sebesar 70% pada tahun 2015, hingga 2.100 US Dolar per orang. Dalam mengejar tujuan ini, Pemerintah Vietnam bermaksud untuk mereformasi dan memodernisasi pemerintahan, mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender, memerangi korupsi dan kejahatan, termasuk semua kegiatan terkait narkoba. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pengawasan obat bius bilateral dengan banyak negara di kawasan Asia, Pemerintah telah memperkuat tanggapan pencegahan dan penindasan untuk melawan kegiatan perdagangan narkoba, baik domestik maupun internasional. Meskipun *Law Enforcement Agencies (LEA)* Vietnam telah menerapkan langkah-langkah ketat untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menuntut para sindikat yang secara ilegal menjual narkoba di jalur darat, laut, dan udara, upaya-upaya ini belum memadai secara finansial dan teknis untuk mengatasi tantangan yang muncul dan modus operandi para pengedar narkoba yang semakin canggih.⁴

⁴ Hai Tanh Luong, "Chapter 9: Drug Trafficking Trends and Its Responses: A Case Study of Vietnam" Hal 201.



Gambar 1. Data pengguna narkoba di vietnam tahun 2010 - 2017



Sumber : ASEAN Drug Monitoring Report 2017 (ASEAN Senior Official on Drugs Matters)

Bukan hal baru Vietnam beresiko untuk menjadi pusat transit narkoba. Di perbatasan Vietnam dan Laos, khususnya di titik segitiga di wilayah barat laut antara Son La, Dien Bien, dan Lai Chau, Vietnam menghadapi beberapa tantangan dalam menanggapi perdagangan narkoba transnasional dari zona pasar *Segitiga Emas*⁵. Sebagian besar pelaku perdagangan narkoba mengambil keuntungan dari kondisi geografis, topografi, dan iklim yang sulit di lintas perbatasan Vietnam - dengan Cina di utara dan Kamboja di selatan - yang menyediakan banyak jalur resmi maupun tidak resmi untuk mengangkut obat-obatan ilegal menuju Vietnam atau keluar dari Vietnam sendiri.

⁵ Hai Tanh Luong, "Vietnam and the Mekong's Synthetic Drugs Epidemic", <https://thediplomat.com/2019/05/vietnam-and-the-mekongs-synthetic-drug-epidemic/> diakses pada 5 juli 2020 pada pukul 21.00.



Pada tahun 2014, dalam salah satu kasus narkoba terbesar di provinsi Quang Ninh di perbatasan dengan China, pasukan polisi anti narkotika Vietnam bekerja sama dengan Tiongkok untuk menyelidiki dan menuntut 89 tersangka karena memperdagangkan lebih dari 12 ton heroin. Tiga puluh orang diberi hukuman mati. Penguasa narkoba di Vietnam telah berkolusi dengan para pedagang Cina dan Laos untuk membuat empat jaringan terbesar di ketiga negara untuk pengangkutan dan perdagangan obat-obatan terlarang antara 2007-2012.⁶

Terletak dekat dengan Segitiga Emas, sebagai salah satu penghasil opium terbesar di dunia, Vietnam telah berkembang pesat sebagai rute transit untuk jaringan perdagangan obat terlarang ke dan melalui beberapa waktu belakangan ini. Kegiatan perdagangan narkotika ilegal, tampaknya, telah menyebar di seluruh negara, termasuk wilayah pedesaan dan perkotaan, dari metropolitan ke daerah pegunungan, tidak membedakan antara kondisi ekonomi atau kondisi buruk. Represi sengit dari pemerintah Thailand juga memaksa penyelundup narkoba untuk mengubah rute pengiriman mereka, pasokan mulai bergerak dari Myanmar menuju Laos, Kamboja, dan kemudian melalui Vietnam.

Dalam menghadapi permasalahan *drug trafficking* negara-negara anggota ASEAN telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkotika. Sejak ditandatanganinya deklarasi Association Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam hal prinsip-prinsip memerangi penyalahgunaan Narkoba (ASEAN Declaration of Principles to Combat the

⁶ *Ibid.*



Abuse of Narcotic Drugs) pada sidang ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Manila pada tanggal 26 Juni 1976. Pertemuan tersebut diselenggarakan setiap tahun, pertemuan itu pada mulanya adalah koordinasi Komite Pembangunan Sosial (Coordination of the Committee on Social Development/COSD), kemudian berganti nama menjadi ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD), yang terbentuk pada tahun 1984. ASOD merupakan wadah pertemuan pejabat senior ASEAN yang khusus membahas mengenai masalah Narkoba.⁷ Sebagai kerjasama untuk melakukan komunikasi, kerjasama di antara negara anggota maupun dengan negara lain, dan untuk mengantisipasi, memutus mata rantai peredaran gelap narkoba yang melintasi batas yuridiksi negara di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs bertempat di Manila yang disepakati oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada tanggal 27 Juni 1976 adalah awal mula dari terbentuknya ASOD. Deklarasi ini menghasilkan rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan program dalam kerja sama untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Kerangka kerja tersebut memiliki empat bidang utama, yaitu penegakan hukum dan perundang-undangan, pengobatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, pelatihan dan penelitian. Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah membuat agenda, merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkoba, serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil working group yang

⁷ Indah Puspita Sari, "Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand" diakses dari [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/22.%201102045147%20-%20Indah%20Puspita%20Sari%20\(11-05-18-02-31-58\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/22.%201102045147%20-%20Indah%20Puspita%20Sari%20(11-05-18-02-31-58).pdf) pada tanggal 27 Mei 2019 pada pukul 13.00



diwadahi oleh ASOD sendiri.⁸ Misi yang paling penting dari ASOD sekarang adalah untuk mewujudkan pada tahun 2015, Asia Tenggara bebas dari obat-obatan terlarang dalam hal produksi budidaya mereka, manufaktur, perdagangan, dan penyalahgunaan. Hal ini selaras dengan visi ASEAN 2020 yaitu, untuk peningkatan kooperatif dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya narkoba.⁹

Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi terkait.¹⁰ Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi masalah narkoba yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang bertujuan merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya. Maka ASOD membantu mengurangi atau bahkan memberantas Drugs Trafficking di Vietnam dengan membangun kerjasama

⁸ ASEAN Senior Officials on Drugs Matters

<https://asean.org/asean-political-security-community/asean-ministerial-meetings-drugs-ammd/asean-senior-officials-drug-matters-asod/> diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 4.20.

⁹ Ibid.

¹⁰ Tiara Sauqi "Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Vietnam (2009 – 2013)" hal. 8. diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publications/31985-ID-peranan-asean-senior-officials-on-drugs-matters-asod-dalam-menanggulangi-drugs-t.pdf> pada tanggal 2 april 2019 pukul 4.20.



eksternal, memfasilitasi, mewadahi, memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika serta memberikan kontribusi dalam hal pendidikan larangan narkoba. Hal ini dilakukan karena pendidikan yang meningkatkan pengetahuan generasi muda di Vietnam untuk ikut serta memerangi Drugs Trafficking.

Dengan kata lain, ASOD tidak terjun langsung kelapangan dalam bentuk aksi namun melalui pertukaran informasi serta keahlian yang diwadahi oleh ASOD, Vietnam diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional. Kembali kepada implementasi kebijakan dan strategi yang dilakukan Vietnam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apa kepentingan Vietnam terlibat agenda keamanan ASEAN dalam kerjasama ASEAN Senior Officials on Drugs Matters tahun 2011 – 2016?”

Penulis berfokus kepada tahun 2011 – 2016 untuk mendeskripsikan apa saja kepentingan nasional Vietnam dalam kerjasama ASEAN Senior Officials on Drugs Matters seiring dengan fokus *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2015-2025* dan pada 2015 terdapat keterlibatan Vietnam pada Asean Economic Community.



1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang kepentingan nasional Vietnam dalam kerjasamanya dalam ASOD adalah:

- a. Apa kepentingan Vietnam sepakat bekerjasama dengan *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*?
- b. Mendeskripsikan pola Vietnam dan *ASEAN bekerjasama dalam ASEAN Senior Officials on Drugs Matters*

1.3 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan akademis, yaitu:

- a. Sebagai bahan yang dapat dikaji oleh para penstudi lain dan membantu penelitian terdahulu serta membangun dan mengembangkan pemikiran dalam studi Hubungan Internasional
- b. Memberikan informasi kepada khalayak umum atau penelitian berikutnya yang akan meneruskan penelitian dengan bahan kajian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan 2 studi terdahulu yang masing-masing memiliki kesamaan isu dan memiliki persamaan dalam hal konsep. Penulis menggunakan studi terdahulu yang berjudul *Merida Initiative and Effectiveness: An Analysis of Supply-Side Policy* yang ditulis oleh Michael Hughes pada tahun 2013 dan *South Africa's National Interest and BRICS* yang ditulis oleh Anthony Van Nieuwkerk pada tahun 2010 lalu.

Pada penelitian pertama yang berjudul *Merida Initiative and Effectiveness: An Analysis of Supply-Side Policy* dan ditulis Michael C. Hughes, Andrew membahas tentang hubungan kerjasama Merida Initiative dan mengukur tingkat keefektifitas dari Merida Initiative sendiri.¹¹ Hughes, pada penelitiannya menjelaskan bagaimana implikasi kebijakan dari Merida Initiative yang berdampak kepada negara-negara di Amerika Selatan. Persamaan dengan penelitian yang tulis di kaji adalah persamaan isu yang dibahas, dimana penulis menggunakan kasus *Drug Trafficking* dan kerjasama antar Amerika Serikat dan Meksiko melalui Merida Initiative untuk kasus kerjasama antara Vietnam dengan negara - negara di ASEAN pada kerjasama *ASOD*. Perbedaan dengan tulisan yang penulis kaji disini ada pada konsep yang digunakan, dalam thesisnya Hughes lebih menekankan penjelasan terhadap efektivitas kebijakan dan dampak dari adanya Merida Initiative terhadap Meksiko dan Amerika Selatan, sedangkan disini

¹¹Mark C. Hughes, *Merida Initiative and Effectiveness: An Analysis of Supply-Side Policy*.(Naval Post Gradual School (Monterey California), Juni 2013) diakses dari <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a584082.pdf> pada tanggal 8 September 2019 pukul 3.25.



penulis lebih berfokus kepada kepentingan nasional dari Vietnam dalam kerjasama dengan ASEAN, dan bagaimana *Asean Seniors Official on Drugs Matters* memenuhi kepentingan nasional dari Vietnam.

Studi terdahulu yang kedua adalah *South Africa's National Interest and BRICS* yang ditulis oleh Anthony Van Nieuwkerk. Dalam tulisannya Anthony menjelaskan bahwa tergabungnya Afrika Selatan kedalam forum yang BRICS yang diikuti beberapa negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina merupakan upaya bagi Afrika Selatan dalam memenuhi kepentingan nasionalnya yang berfokus kepada kepentingan ekonomi dan keamanan negaranya.¹² Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam tulisan ini adalah persamaan konsep yang dipakai, Anthony juga menggunakan analisis melalui konsep Kepentingan Nasional milik K.J Holsti yang menganalisa tentang kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu disini Anthony lebih menekankan dan berfokus kepada kebijakan luar negeri tentang keamanan negara. Sedangkan penelitian yang tulis kaji disini menganalisa tentang Kepentingan Vietnam dalam kerjasama multilateral dengan negara - negara ASEAN melalui *ASOD*, dan penulis lebih berfokus pada analisa dan bagaimana bentuk kerjasama dari Vietnam dengan ASEAN ini dalam memenuhi kepentingan nasional dari Vietnam

¹²Anthony Van Nieuwkerk, *South Africa's National Interest: African Security Review*. (Centre of Defence and Security Management, Wits University, 2010).



2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah salah satu konsep yang digunakan untuk memahami perilaku negara dalam satu kegiatan politik luar negeri. Dalam melakukan kegiatan politik, atau mengambil tindakan yang bersifat politis suatu negara pasti berlandaskan pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional inilah yang akhirnya menjadi pedoman atau landasan bagi negara dalam mengambil putusan atau melakukan interaksi seperti melakukan kerjasama atau hubungan dengan negara lain. Konsep ini ada untuk menjelaskan bahwa tiap negara harus mampu memenuhi kebutuhan domestik bagi negaranya sendiri demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Hans. J Morgenthau, yang merupakan salah satu tokoh yang mempopulerkan perspektif realis menggunakan konsep kepentingan nasional (national interest) dan kekuasaan (power) sebagai hal yang utama dalam membangun teori politik luar negeri dan politik internasional. Kedua hal ini kemudian didefinisikan oleh Morgenthau bahwa kepentingan nasional sebagai tujuan negara dalam melakukan kegiatan politik internasional, sedangkan kekuasaan (power) didefinisikan sebagai sarana bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Sedangkan menurut K.J Holsti kepentingan nasional sendiri didefinisikan sebagai tujuan dari kegiatan dari politik luar negeri yang dilakukan negara.¹⁴

Tujuan yang dimaksud disini yaitu sebuah “citra” yang ditunjukkan oleh suatu

¹³Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.(Pustaka LP3ES, 1994) hlm. 163

¹⁴K.J Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Fifth Edition. (New Jersey: Prentice Hall, 1988) hlm. 118



negara mengenai kondisi negara di masa yang akan datang, yang nantinya akan digunakan untuk memperluas pengaruh dari citra tersebut di luar batas teritorial negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah dan mempertahankan perilaku dari negara lain, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui individu ataupun negara.¹⁵ Holsti menjelaskan bahwa untuk menentukan kepentingan nasional ada 3 kriteria utama yaitu *value, time, demand*.¹⁶ *Values* disini memiliki artian sebagai nilai yang menjadi fokus negara tersebut, seperti nilai apa yang menjadi tujuan negara tersebut. *Time* merupakan jangka waktu yang diperlukan oleh satu negara dalam memperoleh tujuannya, ketika suatu negara melakukan perjanjian atau kegiatan politik, negara juga harus mengerti jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuannya. Sedangkan *Demand* adalah kemungkinan dan keinginan untuk mencapai tujuan dari negara mereka dengan melakukan interaksi atau kerjasama dengan negara-negara lainnya.

Tiga hal tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan dan menentukan kepentingan nasional suatu negara, akan tetapi pada bukunya yang ke lima Holsti tidak banyak menyinggung tentang 3 hal tersebut. Di buku ke limanya Holsti lebih menjelaskan tentang klasifikasi kepentingan nasional melalui 3 poin yaitu *Core-interests and values, middle range objectives, dan universal long range goals*. *Core-Interest and values* disini menjelaskan tentang kepentingan utama atau kepentingan yang terletak di dasar hierarki, yang merupakan tujuan utama atas keamanan, otonomi, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di negara tersebut. *Middle Range Objectives* terletak dibagian tengah dimana tujuan ini berada di urutan kedua setelah tujuann utama atau *core-interests and values*. Yang

¹⁵Ibid, hlm. 119

¹⁶K.J Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice-Hal. (New Jersey, 1967) hlm. 131



terakhir yaitu *long range objectives* yang berada pada atas dari hirarki, karena tidak ada kepastian tentang jangka waktu dan minimnya kemungkinan untuk suatu negara dapat menjangkau kepentingan ini, maka kepentingan ini pun tidak menjadi tujuan utama dalam konsep kepentingan nasional yang dijelaskan oleh Holsti ini.

2.2.1.1 Core interests and values

Variabel *Core interests and values* merupakan salah satu variabel yang menjadi pokok utama bahasan. *Core interests and values* dapat disebut juga sebagai kepentingan utama yang menjadi titik fokus dan dianggap penting bagi negara. *Core Interest values* ini merupakan kepentingan yang tergolong dalam kepentingan dalam jangka pendek, sehingga kepentingan ini dianggap sangat penting bagi sebuah negara, karena kepentingan ini dapat mengancam keberlangsungan dari suatu negara jika tidak dapat segera terpenuhi.¹⁷ Negara sering menjadikan kepentingan ini kepentingan yang sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, dan kerap kali negara untuk mencapai tujuan tersebut mengandalkan sumber daya yang mereka miliki. Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya isu yang dibahas dalam studi Hubungan Internasional, disini adanya pergeseran terhadap tujuan utama negara dari kepentingan nasional suatu negara, seringkali kesejahteraan ekonomi dapat menggantikan ekspansi kedaulatan atas wilayah yang menjadi fokus suatu negara.

Dalam hal ini Lenin berpedapat bahwa dalam menentukan kepentingan utama dari suatu negara, maka pembuat kebijakan merupakan orang yang

¹⁷K.J. Holsti, *op. cit*, hlm. 124.



berperan besar dalam menentukan tujuan dasar dari kepentingan nasional yang diambil oleh negara tersebut. Tentunya dari pertimbangan yang diambil oleh pembuat kebijakan nilai yang terkandung dalam kepentingan ini sangatlah besar, hal ini dapat dibuktikan dari tugas pemerintah yang ada dalam suatu negara dalam menentukan kebijakan dan kepentingan harus sesuai dengan aspek *way of life* yang berarti negara tersebut harus melindungi seluruh organ negara dan kehidupannya.¹⁸ Sedangkan melalui praktiknya pemerintah dalam upaya menjaga aspek *way of life* tersebut yaitu dengan melindungi teritori, dan serta adanya pengembangan dalam bidang tata politik, sosial dan ekonomi suatu negara dari ancaman baik yang bersifat domestik maupun global.

a. Self Preservation

Self Preservation adalah salah satu indikator dari core interests and values yang berisi tentang upaya yang tengah dilakukan negara untuk memenuhi kepentingan domestiknya, sehingga negara tersebut dapat bertahan dan mampu menjaga eksistensinya baik dalam lingkup domestik maupun global. Sedangkan untuk bentuk dari *self preservation* sendiri seringkali sangat dipengaruhi oleh si pembuat kebijakan dari negara tersebut. Dalam menentukan parameter di indikator self preservation ini yaitu peneliti harus melihat dan menganalisa tindakan yang diambil oleh pembuat kebijakan di suatu negara mengenai jaminan kedaulatan dan kemerdekaan, hal ini juga tentunya disertai dengan meningkatkan beberapa aspek mendasar yaitu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang termasuk dalam teritori negara tersebut.¹⁹

¹⁸*ibid*, hlm. 126.

¹⁹*ibid*, hlm. 125.



Self preservation mempunyai kontribusi yang besar dalam keberlangsungan hidup suatu negara, karena dalam indikator ini dijelaskan bahwa *self preservation* dianggap sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu negara dalam interaksinya dengan dunia internasional. Dan di era sekarang ini *self preservation* ini lebih condong ke arah perbaikan sistem dan penguatan yang dapat menjaga keutuhan negara dan pastinya peningkatan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan perlindungan teritori yang menggantikan jaminan atas kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara.

b. Defence of strategically vital areas

Dalam menentukan *core interests and values* dalam suatu negara juga harus memperhatikan indikator *defence of strategically vital areas*. Indikator ini berisi tentang kebijakan ekspansi negara yang pada awalnya dipakai untuk memperluas wilayah teritorial suatu negara bergeser menjadi melakukan kontrol atas wilayah-wilayah lain untuk mendapatkan kontrol terhadap aset-aset berharga seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dalam negara tersebut.²⁰ Jadi negara berfokus pada wilayah-wilayah tertentu dalam negaranya yang menjadi titik tumpu utama seperti dalam wilayah tersebut terdapat sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh negara tersebut. Dengan melakukan kontrol atas wilayah-wilayah tersebut pemerintah mendapatkan keuntungan berupa peningkatan dalam hal *state capabilities* terutama dalam sektor ekonomi.

²⁰KJ Holsti, *Op. Cit*, hlm. 126.



Selain itu hal ini juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup negara dengan memegang kendali penuh atas wilayah-wilayah pemerintahan dan vital, sehingga ketika ada ancaman yang masuk ke dalam negara, pemerintah dapat mempersiapkan hal-hal yang berifat preventif sehingga negara tidak kehilangan kedaulatan atas datangnya ancaman tersebut. Seringkali ancaman-ancaman juga datang dari sekitar teritori negara tersebut, dari sini pemerintah dapat melakukan tindak pencegahan dengan mendapatkan kontrol penuh dalam interaksi global, seperti contohnya Amerika Serikat yang membuat NATO (*North Atlantic Treaty Organizations*) dan negara negara di Asia Tenggara membentuk ASEAN untuk melindungi integritas teritorialnya sampai wilayah yang berada dalam lingkup eksternal negaranya seperti wilayah teritori suatu negara yang berdekatan dengan Amerika.

c. Ethnic, religious, or linguistic unity

Aspek yang terakhir ini menyangkut tentang kesatuan suku, agama, budaya dan bahasa, yang merupakan beberapa poin utama untuk menguatkan masyarakat atas persamaan identitas serta mengukuhkan batas wilayahnya berdasarkan kesamaan identitas yang dimiliki masyarakat dalam suatu negara. Hal ini termasuk unsur dasar dari pemahaman nasionalisme, dimana masyarakat harus memahami bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang dikumpulkan atas persamaan dan kedaulatan negara. Kecenderungan konflik yang muncul dalam indikator ini adalah timbulnya konflik di wilayah perbatasan, karena seringkali nilai yang dipahami akan berbeda dengan nilai



yang dipahami oleh teritori negara lain sehingga angka kriminalitas dan konflik perbatasan pun terjadi karena adanya pergesekan nilai, selain itu wilayah perbatasan adalah gerbang masuk suatu negara dari negara lain sehingga hal-hal yang menyangkut wilayah perbatasan dan teritori suatu negara benar-benar menjadi area vital bagi negara. Area perbatasan atau yang lebih kita kenal dengan istilah *border* merupakan wilayah yang rawan konflik, untuk itu pemerintah harus menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara dengan mempertahankan wilayah teritorinya beserta tatanan sosial yang ada didalamnya melalui kebijakan pertahanan negara atau yang dikenal sebagai *defence policies*.²¹

2.2.1.2 Middle Range Objectives

Middle Range Objectives adalah suatu objektif atau kepentingan jarak menengah yang ditentukan oleh negara dan pembuat kebijakan. Variabel ini berfungsi untuk memenuhi kepentingan nasional dari suatu negara, akan tetapi tujuan dari variabel ini sifatnya opsional, hal ini dikarenakan ketika kepentingan dalam variabel ini tidak tercapai atau kerjasama yang dilakukan tidak menemukan titik terang tidak akan banyak berdampak dan beresiko terhadap keamanan dan kesejahteraan dalam suatu negara dan bisa dibilangan kepentingan ini bersifat khusus, ketika aspek inisiatif terpenuhi maka tidak akan begitu berpengaruh terhadap stabilitas negara tersebut, dan dalam hal ini sifatnya adalah *cooperative security*.²²

²¹ Jack Donnelly, *Realism and International Relations* Cambridge University Press, 2000.

²² DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 13 Februari 2006.



Variabel ini juga sering disebut sebagai kepentingan jarak menengah, karena untuk mencapai peningkatan aspek-aspek seperti pembangunan, ekonomi, dan dalam penyelesaian suatu masalah dalam interaksi internasional tidaklah mudah dan dapat memakan waktu yang sangat lama dan tidak sebentar. Untuk melihat lebih jauh dan menentukan kepentingan melalui variabel ini terdapat beberapa indikator, 3 indikator merupakan indikator utama dan beberapa indikator pendukung.²³ Tiga indikator tersebut adalah *private citizen's interest*, *state's prestige*, dan *self-extension*.²⁴ Sedangkan untuk indikator tambahan disini antara lain *promoting human rights*, *environmental regulations*, dan *the development of international institutions*.²⁵

a. Private citizen interests

Dalam mengambil kebijakan juga para pembuat kebijakan juga berfokus pada kebijakan yang diambil baik untuk negaranya sendiri maupun negara lain di sekitarnya yang memiliki hubungan kerjasama dengan negara tersebut. Untuk memenuhi beberapa aspek yang memang menjadi kepentingan jangka panjang pemerintah sendiri dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga dalam praktiknya biasanya negara rela menggunakan sumber daya yang dia miliki untuk memenuhi kepentingan kelompok warga negara bahkan di luar teritorialnya sendiri.²⁶ Ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencapai suatu kepentingan, ketika ada kepentingan yang harus dicapai, maka akan ada salah satu aspek yang akan dikorbankan, dan disini pemerintah dalam suatu negara terkadang, dalam

²³ KJ Holsti, *Op. Cit*, hlm. 121.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 127.



melindungi kepentingan ini pemerintah pun apabila diperlukan dapat memberikan bantuan berupa dana atau pasukan militer, meskipun terkadang kepentingan tersebut dampaknya minim terhadap kehidupan sosial yang ada di negaranya.²⁷ Disini dapat dilihat bahwa kepentingan eksternal juga menjadi kepentingan jangka menengah pemerintah dari suatu negara, karena pemerintah menilai untuk menjaga perdamaian di negaranya sendiri dan memenuhi kepentingannya maka negara juga harus dapat menjaga stabilitas dalam teritorinya maupun diluar teritorinya apalagi dalam bentuk kerjasama internasional, diperlukan adanya *win solution* bagi kedua negara tersebut.

b. State's Prestige

State's prestige merupakan salah satu indikator dari *Middle range objectives* yang berisi tentang peningkatan nama baik oleh negara di level domestik maupun internasional. Untuk melindungi citra dari negara dan meningkatkan nama baik dari negara ini, negara dapat berupaya dengan bergabung dengan organisasi internasional, melakukan kerjasama dalam hal pertukaran sumber daya, dan aspek pertukaran teknologi, serta peningkatan kapabilitas militer.²⁸ Dalam indikator ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan citra suatu negara disini adanya pengembangan dalam bidang-bidang tertentu seperti peningkatan kapabilitas militer dan infrastruktur bagi suatu negara sangat penting untuk menaikkan citra baik dan meningkatkan status diplomatik negara tersebut.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*



c. Self Extension

Self Extension adalah upaya suatu negara dalam memperluas wilayahnya, atau lebih tepatnya digunakan untuk tujuan ekspansi dengan melakukan imperialisme. Dari proses ekspansi wilayah disini dapat menjadi poin tambahan bagi negara karena biasanya negara akan mendapatkan akses bahan baku yang, serta dapat menyelesaikan masalah di negaranya dengan berekspansi ke wilayah diluar teritori negara tersebut yang dapat ditembh dengan beberapa jalur contohnya dengan mengerahkan diplomasi.²⁹

Untuk *self extension* sendiri disini tidak hanya berfokus kepada perluasan wilayah teritori, akan tetapi bisa juga dengan persebaran ideologi yang ada dalam masyarakat, lalu penurunan bantuan melalui penurunan pasukan untuk mengatasi masalah yang ada di teritorial lain dari negara tersebut, dan hal ini dapat dianalogikan seperti persebaran ideologi seperti pada saat Rusia menyebarkan ideologi sosialisme ke negara-negara timur seperti ke Tibet, Cina, dan beberapa negara lainnya.³⁰

Sedangkan untuk indikator tambahan seperti *promoting human rights* disini juga merupakan indikator yang juga harus diperhatikan negara karena hal ini terkait dengan hak asasi manusia, sedangkan untuk poin *environmental regulations*, dan *development of international institutions* berfokus kepada pembenahan dalam lingkup sosial dan bentuk kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional bagi masing-masing negara.

²⁹ *Ibid*, hlm. 128

³⁰ *Ibid*, hlm. 129



d. Promoting Human Rights

Promoting *Human Rights* disini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mempromosikan HAM, dan berfokus kepada isu kemanusiaan, dimana dalam mencapai suatu tujuan negara disini juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan disini dianggap sangat penting karena di dalam dunia internasional keberlangsungan hidup dari masyarakat yang ada di negara akan ditanggung sepenuhnya oleh negara,³¹ upaya ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dari Negara untuk menjaga keberlangsungan hidup Masyarakatnya sesuai HAM, nilai dan aturan yang berlaku sesuai sistem internasional sehingga negara dapat mempermudah akses untuk memenuhi kepentingannya dengan mempromosikan isu kemanusiaan, dan melindungi keberlangsungan hidup masyarakat.³²

2.2.1.3 Long Range Goals

Variabel Long Range Goals disini mempunyai definisi dimana dalam berinteraksi seperti melakukan kerjasama atau perjanjian merupakan tujuan jangka panjang yang akan menjadi target dari interaksi/kerjasama yang dilakukan oleh satu negara atau lebih yang bertujuan untuk merubah pandangan dan merekonstruksi sistem internasional secara keseluruhan, dan berusaha

³¹ Karen A. Mingst dan Ivan M. Arreguin-Toft, "*Essentials of International Relations – Seventh Edition*", W.W Norton & Company, Inc, 2017, hlm. 367.

³² *Ibid.*, hlm 368.



memperbaiki sistem internasional agar terciptanya kerjasama yang lebih *sustainable* dan mengaplikasikan nilai-nilai internasional yang sesuai dengan kepentingan dari suatu negara.³³ Di poin negara negara dapat menciptakan suatu tatanan baru dan ideologi baru dalam dunia internasional seperti yang dilakukan Amerika Serikat saat mengeluarkan kebijakan *War on Terror* paska berakhirnya kasus 9/11 kemarin. Dari hal ini beberapa negara di dunia dapat terdoktrin bahwa tindak terorisme sendiri menjadi musuh bersama dan menciptakan sebuah sistem dan kebijakan baru bagi dunia untuk bersama melaukan *war on terror*. Hal ini tentunya berbeda dengan variabel-variabel sebelumnya, karena dalam pelaksanaannya, karena untuk mencapai kepentingan universal dibutuhkan waktu yang relatif lama, dan untuk mencapai kepentingan universal banyak lagi aspek-aspek yang harus dicapai, dan untuk waktu terrealisasinya kepentingan ini pun masi tidak bisa ditebak, entah bisa 20 tahun mendatang, atau beberapa tahun setelahnya. Dan biasanya negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya tidak semuanya akan dapat mencapai *long range goals*, kecuali hal tersebut selaras dengan *core interests and values* dari negara tersebut.

2.3 Definisi Operasional

Dalam memahami tentang pola interaksi suatu negara dengan negara lain, atau bentuk kerjasama dengan negara lain, suatu negara juga akan menyertakan kepentingan-kepentingan nasionalnya sebagai landasan dalam menjalin kerjasama dengan ngara lain dan dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Kepentingan nasional sendiri memiliki definisi kepentingan yang harus dicapai

³³ *Ibid.*, hlm. 129.



suatu negara di tingkat domestik, dengan cara melakukan interaksi maupun kerjasama dengan negara-negara lain, agar dapat memenuhi kepentingan domestik dari suatu negara tersebut. Melalui bentuk kerjasama dari Vietnam dan negara – negara ASEAN melalui *ASOD*, disini penulis akan menganalisa kepentingan nasional Vietnam dalam kerjasama tersebut dari tahun 2011 - 2016.

Pada kasus yang penulis bahas kali ini disini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional yang di tulis oleh K.J. Holsti yang pennulis gunakan untuk menganalisa dan mengetahui apa saja kepentingan yang dibawa oleh Vietnam dalam kerjasamanya bersama ASEAN melalui *ASOD*. Nantinya kepentingan ini akan dianalisa dengan mengacu pada konsep yang ditulis oleh Holsti yang menjelaskan kepentingan nasional melalui 3 poin yaitu, *core-interest and values*, *middle range objectives*, dan *long range goals*.

2.3.1 Core Interest and Values

Seperti yang sudah dijelaskan dalam poin di atas disini prnulis akan menganalisa apa kepentingan Vietnam melalui kerjasamanya dengan ASEAN sesuai dengan 4 pillar yang disepakati dan pada masa pemerintahan Truong Tân Sang. Analisa ini nantinya akan membantu penulis untuk mengklasifikasikan kepentingan apa saja yang dibawa Vietnam pengembangan kerjasama yang dilakukan antara Vietnam dan ASOD. Dan penulis akan lebih berfokus kepada bahasan apa yang menjadi kepentingan jangka pendek dari kepentingan nasional Vietnam dalam memperpanjang dan memperbaharui kebijakan kerjasama dengan *ASOD*.



2.3.1.1 *Self Preservation*

Self Preservation seperti yang dijelaskan di atas tadi adalah upaya yang dilakukan negara untuk mencapai suatu kepentingan yang dinilai sangat penting/urgent. Melalui indikator ini penulis akan menganalisa kepentingan apa yang harus segera dicapai oleh satu negara dengan berfokus kepada tindakan Vietnam dalam memperbaiki dan menguatkan beberapa aspek seperti pertahanan, tatanan politik, dan perlindungan atas wilayah teritorinya. Selain itu untuk mengetahui dan mengidentifikasi kepentingan dalam hal *self preservation* penulis akan melihat apakah ada perbaikan dan penguatan sistem entah itu dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun pertahanan.

2.3.1.2 *Defence of Strategically Vital Areas*

Dalam indikator ini penulis akan menjelaskan tentang kontrol dan akses terhadap aset sumber daya ataupun wilayah-wilayah vital dimana wilayah tersebut sangat vital dan dapat meningkatkan kapabilitas dari suatu negara. Hal ini juga tentunya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, ketika ancaman yang masuk ke dalam suatu negara sifatnya eksternal maka suatu negara pun harus dapat memegang kontrol wilayah di dalam maupun di luar teritorinya. Ketika ancaman berasal dari eksternal atau wilayah luar teritorinya maka negara itu juga harus memegang kendali atas wilayah yang menjadi sumber permasalahan karena dapat berimbas tidak hanya pada satu negara. Imbasnya akan berdampak kepada dua negara yang teritorinya berdekatan. Melalui indikator ini penulis ingin melihat bagaimana kepentingan



Vietnam dalam melakukan kontrol dan kerjasama di luar wilayah teritorinya melalui perjanjian kerjasama yang dibuat dengan ASEAN yaitu Asean Senior Officials on Drugs Matters.

2.3.1.3 *Ethnic, Religious, or Linguistic Unity*

Persatuan dari warga negara yang meliputi tentang kesatuan suku, bahasa, agama, budaya merupakan komponen yang penting dan harus diperhatikan oleh negara. Karena seringkali stabilitas negara dapat terganggu dengan adanya konflik-konflik yang muncul seperti adanya diskriminasi antar suku dan agama lain, dan perbedaan budaya yang diyakini yang pada akhirnya menyebabkan konflik-konflik tertentu. Penting bagi negara untuk menjaga stabilitas dari warga negaranya sendiri sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi, dan biasanya daerah yang berbatasan dengan engara lain atau teritori lain sangat sering terjadi konflik. Disini penulis ingin melihat apakah Vietnam juga memperhatikan faktor-faktor sosial it sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi dan mengantisipasi ancaman yang masuk ke negaranya.

2.3.2 **Middle Range Objective**

Variabel ini merupakan variabel yang levelnya berada dibawah variabel *core interest and values* dimana seringkali dideskripsikan sebagai kepentingan jarak menengah karena dalam variabel ini berfokus kepada peningkatan kemampuan, peningkatan nama baik, dan untuk menyediakan kepentingan pihak-pihak tertentu seperti dalam kerjasama yang dilakukan oleh dua negara,



disini kepentingan dari negara/pihak lain juga harus diperhatikan demi tercapainya *win-win solution* bagi kedua negara tersebut. Untuk mencapai kepentingan ini pun butuh waktu yang dirasa tidak sedikit, karena adanya kepentingan dari pihak-pihak lain yang harus dipenuhi dan jangkauannya lebih luas karena level analisisnya makin luas seperti kesepakatan yang akan dicapai dalam kerjasama bilateral, multilateral atau regional. Disini penulis ingin melakukan identifikasi terkait kepentingan jarak menengah Vietnam dalam kerjasamanya dengan ASEAN melalui ASOD tahun 2011-2016.

2.3.2.1 Private Citizen's Interests

Pemerintah di suatu negara biasanya menjalin kerjasama dengan negara-negara tertentu, atau firma-firma tertentu yang berinvestasi di negaranya. Disini pemerintah juga harus befokus menjaga agar aliran dana dari investasi dan firma-firma swasta yang berinvestasi di negaranya tetap bertahan, dan hal ini pun dapat direalisasikan dengan menggunakan *power* dari negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di negaranya, ketika ada ancaman seperti *drugs trafficking* disini akan menyebabkan instabilitas ekonomi di negaranya, yang mebuat investor pun akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi jangka panjang di suatu negara. Disini pun pemerintah pun juga harus menjaga konektivitas dan kestabilan ekonomi dari negaranya, sehingga ketika ada ancaman yang masuk entah dari dalam maupun luar teritorinya bila diperlukan, negara dapat menurunkan pasukan untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi demi menjaga stabilitas dan keamanan, baik bagi negaranya sendiri maupun pihak-pihak lain yang ada di negaranya.



2.3.2.2 State prestige

Dalam indikator *state prestige* ini, sebuah negara dalam membina relasi dan melakukan interaksi dengan negara lainnya tentunya akan membawa nama baik dari negaranya, dan juga mempertimbangkan nama baik negara yang akan diajak kerjasama. Oleh karena itu faktor nama baik negara ini juga mempengaruhi dan harus dijaga oleh negara itu sendiri. Dan upaya suatu negara dalam menjaga nama baik bisa dilihat dari peningkatan kemampuan negara dalam bidang tertentu seperti peningkatan dalam sektor diplomatik, ekonomi, pengembangan industri, militer, serta spek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Indikator ini penulis ingin melihat bagaimana cara dan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan tingkat prestis Vietnam dalam kerjasamanya bersama ASEAN melalui ASOD

2.3.2.3 Self Extension.

Indikator *self extension* menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya, atau bisa juga dibilang sebagai tuntutan negara terhadap teritorial di luar wilayah kekuasaannya. Konsep ekspansi sendiri memiliki banyak makna, ekspansi dapat diartikan sebagai proses akusisi suatu wilayah diluar wilayah negara tersebut guna untuk memperluas kekayaan dan power dari negara tersebut, dilain sisi disini penjelasan tentang ekspansi tidak hanya tentang akusisi wilayah negara lain, ekspansi sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah atau teritori negara lain untuk mencapai kepentingan negaranya. Disini penulis ingin melihat apakah ada

upaya ekspansi seperti yang dilakukan oleh Vietnam dalam kerjasamanya bersama ASEAN melalui ASOD pada tahun 2011-2016.

2.3.2.4 Promoting Human Rights

Indikator ini menjelaskan apakah ada atau tidaknya nilai-nilai kemanusiaan yang terpenuhi dalam suatu hubungan internasional atau kerjasama yang dilakukan 2 negara atau lebih. Dalam indikator ini dijelaskan bahwa dalam suatu kerjasama internasional, adakah upaya dari suatu negara untuk mempromosikan isu tentang HAM, atau dalam isu yang dibahas adakah nilai-nilai HAM yang dijunjung disini. Dalam indikator ini penulis ingin melihat adakah upaya dari Vietnam untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan melalui kerjasamanya dengan ASEAN pada tahun 2011-2016.

2.3.3 Long-Range Goals

Long range objectives adalah variabel yang berisi kepentingan jangka panjang negara dalam melakukan kerjasama/interaksi dengan negara lain. Kepentingan ini merupakan salah satu kepentingan yang sulit untuk tercapai karena ketidakpastian durasi dan waktu yang harus dihabiskan oleh negara. Seringkali kepentingan ini menjadi *goal* akhir bagi negara karena didalam kepentingan ini terdapat indikator *new order* dimana dalam indikator tersebut dijelaskan bahwa kepentingan ini digunakan oleh negara untuk mencapai cita-cita, tujuan jangka panjang dan pada kepentingan ini dijelaskan bahwa negara berupaya merubah tatanan atau sistem internasional sesuai dengan keinginan, visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Seringkali negara dalam



mewujudkan kepentingan ini menyebabkan ketidakstabilan pada sistem internasional. Dalam variabel ini penulis ingin melihat bagaimana Vietnam dalam bekerja sama dengan ASEAN melalui ASOD dalam mencapai dan merekonstruksi sistem internasional dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang sesuai dengan kepentingan Vietnam sendiri.

2.4 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Konsep Kepentingan Nasional

Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Core Interests and Values</i>	<i>Self Preservation</i>	Memastikan suatu kedaulatan negara yang berdasar pada wilayah teritorial negara mengacu pada penguatan sistem politik, ekonomi, sosial, dan penguatan teritori negara tersebut.	Upaya dari Pemerintah Vietnam dalam penguatan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan penjagaan wilayah teritorial Vietnam dari ancaman narkoba masuk ke Vietnam.
	<i>Defence of Strategically vital areas</i>	Melakukan kontrol wilayah atau teritori disekitar negara tersebut (negara tetangga) yang mengandung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya.	Kontrol dari Vietnam atas negara negara di ASEAN dalam kasus <i>Drug Trafficking</i> .
	<i>Ethnic, religious, or linguistic unity</i>	Melihat upaya suatu negara dalam melindungi suku,	Vietnam berusaha mengatasi konflik yang terjadi di



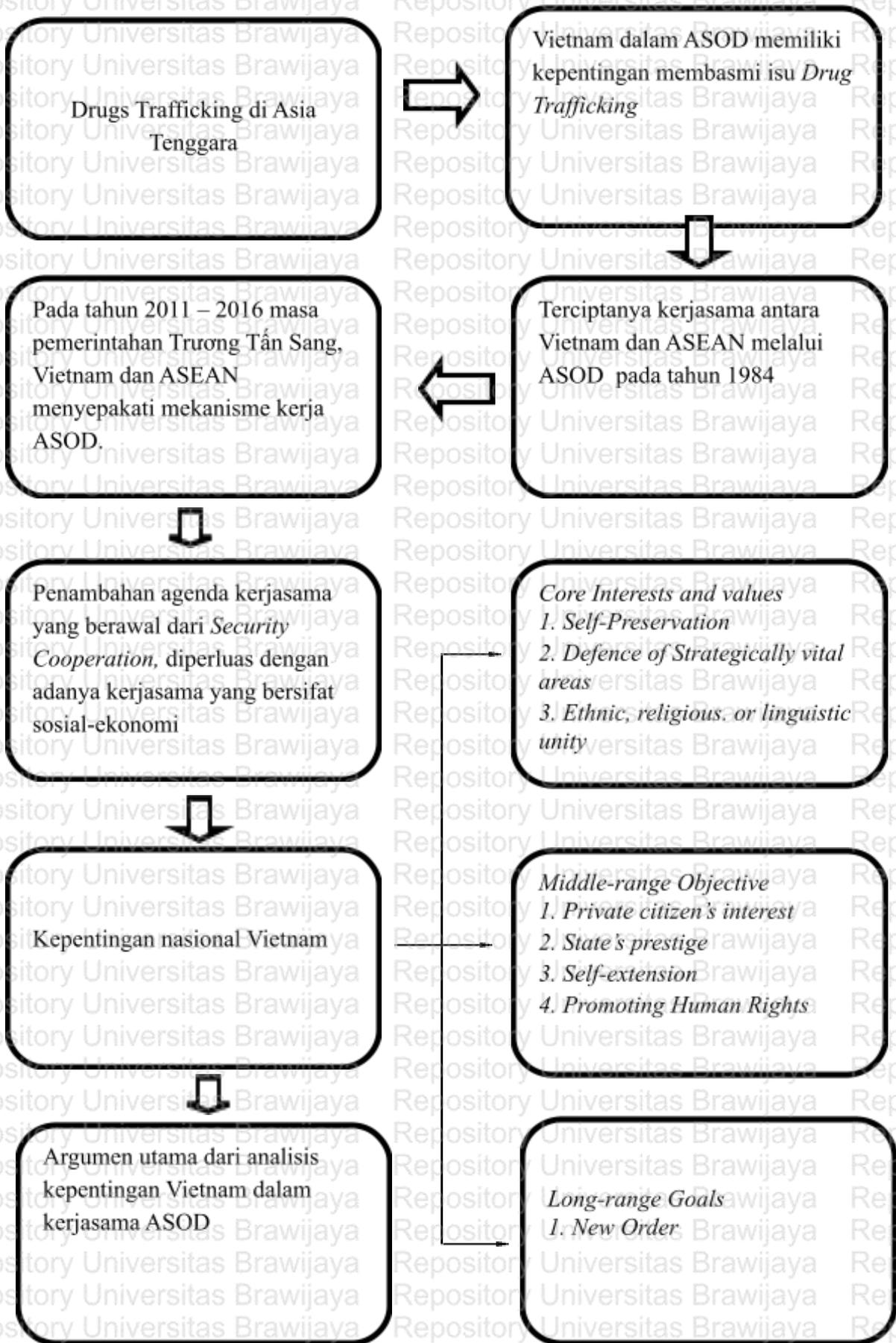
		agama, dan bahasa (<i>social order</i>) yang ada di negara tersebut dengan menggunakan <i>territorial order</i>	perbatasan diakrenakan aktivitas perdagangan narkoba di perbatasan.
<i>Middle Range Objectives</i>	<i>Private citizen's interest</i>	Menggunakan <i>power</i> dari negara untuk melindungi firma-firma dan investasi negara yang ada pada suatu wilayah.	Vietnam melindungi wilayah yang mengandung firma-firma dan melindungi investasi melalui ASOD.
	<i>State Prestige</i>	Peningkatan nama baik suatu negara di lingkungan internasional melalui pengembangan industrial dan IPTEK, upaya diplomatik, peningkatan kapabilitas militer, pemberian bantuan luar negeri, dan pengembangan persenjataan	Vietnam tergabung bersama melalui <i>ASOD</i> dan 4 pilar baru yang disepakati berusaha menyelesaikan permasalahan <i>drug trafficking</i> untuk menekan angka narkoba yang masuk ke Vietnam dan menjaga stabilitas teritorialnya.
	<i>Self-Extension</i>	Melihat upaya dari suatu negara untuk melakukan ekspansi yang bersifat teritorial dan <i>ideological expansion</i> (nilai-nilai yang berdasar dari sosio-ekonomi, politik, agama dan kebudayaan) dari negaranya	Vietnam melalui <i>ASOD</i> berusaha mengembangkan nilai-nilai yang mereka bawa dan berusaha mengembangkan ASEAN <i>War on Drugs</i> .
	<i>Promoting Human Rights</i>	Melihat kepentingan suatu	Vietnam berusaha mengatasi



		<p>negara dalam tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap HAM</p>	<p>permasalahan kekerasan narkoba, melakukan preventif dan mengurangi kekerasan yang diakibatkan oleh penjualan narkoba, baik dalam lingkup internasional dan domestik.</p>
<p><i>Long Range Goals</i></p>	<p><i>New Order</i></p>	<p>Melihat bagaimana cara sebuah negara dalam merekonstruksi sistem internasional dengan mengaplikasikan nilai-nilai universal yang sejalan dengan kepentingan</p>	<p>Melihat bagaimana Vietnam menyelesaikan permasalahan seputar <i>Drug Trafficking</i> di tingkat regional Vietnam dan Asia Tenggara.</p>



2.5 Alur Pemikiran





2.6 Argumen Utama

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang, Vietnam melalui agenda-agenda ASOD berusaha menanggulangi angka narkoba yang masuk ke negaranya. Hal ini dibuktikan dengan agenda ASOD yang membantu pemberantasan narkoba di beberapa negara di Asia Tenggara yang efektif, hal ini kemudian menjadi langkah Vietnam dalam mengatasi jumlah narkoba yang masuk dan hal ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat permintaan yang tinggi terhadap narkoba di Vietnam. Tahun 2011 – 2016, Vietnam menjadi negara yang lebih membuka diri dalam aspek ekonomi dan sektor industrinya. Hal ini tidak menutup kemungkinan membuka jalur perdagangan ilegal yang salah satunya merupakan narkoba masuk ke Vietnam. Selain itu dengan menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan kualitas sosial masyarakat dimana hal ini dapat mendukung kepentingan Vietnam dimana negara tersebut akan memperkuat sektor ekonomi dengan perdagangan terbuka dan sektor industri yang lebih masif.

ASOD yang masih mengadaptasi aturan aturan ASEAN merupakan cara yang preventif untuk membantu penanggulangan peredaran narkoba di Asia Tenggara. Dari agenda yang disepakati di tahun 2011 – 2016, sesuai dengan konsep yang dikemukakan K.J Holsti, disini kepentingan Vietnam diklasifikasikan sebagai Kepentingan jangka menengah, dimana adanya nilai HAM yang diangkat, dan pembangunan infrastruktur untuk tindak preventif, dimana kedua poin tersebut memenuhi indikator *Promoting Human Rights* dan *Self Extension* dari variabel *Middle Range Objectives*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis disini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan keadaan secara empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, dari hasil uraian tersebut akan dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini memiliki level analisa pada tingkat negara yaitu analisa terhadap kepentingan nasional Vietnam. Penelitian ini akan difokuskan pada kepentingan nasional Vietnam tahun 2011-2016 selama masa kepemimpinan Truong Tân Sang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis disini menggunakan studi pustaka. Data berasal dari iteratur, jurnal, berita, artikel, *press release*, opini publik dan artikel internet bersifat resmi, *e-book* dan sumber terpercaya yang kredibel lainnya yang kemudian mendukung penulis dalam kebutuhan data di penelitian ini.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan data non-statistik atau kualitatif. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh secara sistematis dan melakukan analisa dalam menyimpulkan sebuah kasus yang akan penulis teliti dengan level analisa negara dengan ruang lingkup penelitian dibatasi di masa



kepemimpinan Truong Tân Sang tahun 2011 - 2016 sebagai presiden Vietnam dalam kerjasama *ASOD*.

3.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, berisikan latar belakang yang menjelaskan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka; berisikan tentang studi terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, kemudian teori yang digunakan oleh penulis, operasionalisasi konsep, kerangka pemikiran serta argumen utama.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menjabarkan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, ruang lingkup, teknik pengumpulan dari data, teknik analisa data, sistematika penulisan.

BAB IV: Gambaran Umum, dalam Bab ini penulis menjabarkan objek penelitian yang akan penulis bahas, dan menyajikan data-data seputar objek penelitian yang akan penulis bahas

BAB V : Pembahasan, berisi tentang pembahasan dan isi tentang keterkaitan objek penelitian dengan konsep yang penulis bahas untuk membuktikan argumen utama yang ditulis oleh penulis.

BAB VI: Kesimpulan, berisi tentang hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis dan saran bagi khalayak umum serta bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti menggunakan bahan kajian yang sama.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN NARKOBA DI VIETNAM DAN *ASEAN SENIOR ON DRUGS MATTERS*

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Vietnam secara umum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ketersediaan obat-obatan dan narkotika secara luas dan bebas di pasaran dalam masa krisis sekarang, narkotika merupakan komoditi yang diperjual belikan karena menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga peredarannya meluas hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat menghasilkan uang dalam waktu yang cepat. Walaupun Vietnam tidak termasuk di dalam kategori negara produksi narkoba terbesar di asia tenggara yang terdiri dari negara thailand, myanmar, dan laos yang biasa di kenal denga Golden Triengle (segitiga emas), Vietnam perlu di perhatikan dan di waspadai. Dewasa ini Vietnam menjadi salah satu pintu gerbang kawasan asia tenggara dalam perdagangan obat terlarang. Dimana yang menjadi faktor pendukung dari keadaan ini adalah letak geografis yang strategis untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta wilayah transit narkotika, kemiskinan, situasi sosial politik yang tidak stabil, kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN, permasalahan dana dan lemahnya manajemen perbatasan (hukum)



4.1. Gambaran Umum ASEAN Seniors on Drugs Matters

Kejahatan lintas negara yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia dan permasalahan narkotika. Perkembangan transnational crime khususnya permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang membuat ASEAN memiliki tekad untuk menangani kejahatan tersebut yang tertuang di dalam tujuan serta prinsip dari ASEAN, yaitu menanggapi secara efektif segala bentuk ancaman baik kejahatan lintas negara maupun tantangan lintas batas.³⁴ Upaya ASEAN dalam menangani permasalahan narkotika dimulai pada tahun 1972 dengan diadakannya ASEAN Expert Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse. Hal tersebut diadakan dengan harapan ASEAN dapat memerangi drugs trafficking di kawasannya. Pada sidang ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Manila 26 Juni 1976, ditandatangani *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcitocs Drugs* yang merupakan langkah awal ASEAN untuk menghadapi kasus narkotika.³⁵

Asean Senior Official On Drugs Matters, kerjasama ASEAN dalam mengontrol narkotika dan obat terlarang, awalnya dibuat di bawah lingkup pertemuan para ahli obat-obatan ASEAN yang pertama diadakan pada tahun 1976 dan berada di bawah koordinasi Komite Pembangunan Sosial (COSD). Pertemuan yang diadakan setiap tahun ini berganti nama menjadi Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD) pada tahun 1984. Mandatnya termasuk untuk meningkatkan *implementasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the*

³⁴ Association of Southeast Asian Nations, 2012, *"The ASEAN Charter In English and ASEAN Languages"*, Jakarta: ASEAN Sekretariat, hal. 121.

³⁵ ASEAN Sekretariat, *ASEAN Plan of Action* (Jakarta, 1994), hal. 7.



Drug Problem of Narcotic Drugs 1976 mengkonsolidasikan dan memperkuat upaya kolaboratif dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di wilayah tersebut; pemberantasan budidaya tanaman narkotika di wilayah tersebut dan desain, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi semua program ASEAN berupa tindakan dan pengontrolan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.³⁶

Dalam upaya mengatasi drugs trafficking, ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama. ASOD ditugaskan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba serta pencucian uang hasil dari perdagangan narkotika. Pada tahun 1984 ASOD diresmikan dan menghasilkan Rencana Aksi ASEAN terhadap pengendalian narkotika. Rencana Aksi ASEAN tersebut difokuskan ke dalam empat bidang yaitu pendidikan pencegahan, terapi dan rehabilitasi, penegakan hukum, dan penelitian.³⁷

Sebagai badan khusus ASEAN dalam penanganan drugs trafficking, terdapat tugas-tugas yang dimiliki ASOD sebagai berikut³⁸ :

- a. Pandangan, pendekatan dan strategi diselaraskan oleh ASOD untuk menangani drugs trafficking di wilayah ASEAN.
- b. Menegakkan hukum, menyusun undang-undang. Memberikan

³⁶ ASEAN One Vision One Identity One Community, "Plan of Action on Drug Abuse Control", https://asean.org/?static_post=plan-of-action-on-drug-abuse-control, diakses pada 5 juli 2020.

³⁷ Badan Narkotika Nasional RI, 2010, "Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam hal Kerjasama Pengendalian Narkoba dan Obat-obatan", https://bnn.go.id/blog/siaranpers/pertemuan_asean_senior_officials_on_drug_matters_asod_dalam_hal_kerjasama_pengendalian_narkoba_dan_obat-obatan/ / diakses pada 5 juli 2020 pada pukul 19.00.

³⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2000, "Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional" Deplu RI, hal. 173-174.



pemahaman dengan cara pendidikan, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.

c. Dalam pertemuan ASEAN Drug Expert ke-8 di Jakarta tahun 1984.

Maka terdapat kesepakatan bahwa ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control dijalankan oleh ASOD.

d. International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking telah menetapkan pedoman menyangkut bahayanya narkoba dan pedoman tersebut harus dilaksanakan.

e. Mengevaluasi dan memonitor semua program yang dirancang dalam penanganan masalah narkoba di kawasan negara anggota ASEAN

f. Berusaha mendorong pihak ketiga untuk melakukan kerjasama dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan obat – obatan terlarang.

g. Melakukan peningkatan upaya untuk mencapai ratifikasi, pelaksanaan semua ketentuan pbb yang saling terkait dengan perdagangan narkoba

Secara umum, peran ASOD tertuang dalam “ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug and Illicit Trafficking” yang

berisikan tiga variabel utama yaitu kebijakan, pendekatan, dan strategi. Peran

ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitaskan, serta

memberikan saran terkait penanggulangan peredaran narkoba. ASOD berperan



sebagai badan informasi negara anggota dalam mendapatkan informasi terkait dengan kondisi drugs trafficking di luar kawasan. Hal ini dikarenakan ASEAN memiliki hubungan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti kerjasama dengan badan yang menangani masalah drugs trafficking di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC).

Dengan adanya kerjasama tersebut, informasi ini dapat memperkecil terjadinya perkembangan drugs trafficking. Pada tanggal 25-26 Agustus 2008, ASOD mengadakan pertemuan ke-29 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada pertemuan yang dilakukan telah menghasilkan beberapa rekomendasi dari kelompok kerja (*Working Groups*) sebagai berikut³⁹ :

- a. *Alternative Development*
- b. *Preventive Education*
- c. *Treatment and Rehabilitation*
- d. *Law Enforcement*
- e. *Research.*

Pada pertemuan ke-30 ASOD di Phnom Penh, Kamboja tahun 2009, telah menghasilkan rencana kerja ASOD Terkait Usaha Memerangi Pembuatan Ilegal dan Penyalahgunaan Narkoba (ASOD Work Plan on Combating Illicit Drug Manufacturing Trafficking and Abuse (2009- 2015) sebagai suatu komitmen kuat ASEAN dalam memerangi bahaya Narkoba. Rencana kerja ini dibuat dengan tujuan mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015. Secara umum, mekanisme kerja

³⁹ ASEAN *Selayang Pandang Edisi ke-19* (Jakarta, 2010), halaman 153.



ASOD adalah badan yang dibentuk untuk membuat agenda pertemuan, merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah drugs trafficking, serta menghasilkan rekomendasi dari hasil working group yang diwadahi oleh ASOD sendiri. Maka, tugas ASOD adalah menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba, melalui konsolidasi.

Amerika Serikat, Tiongkok, Australia dan Pakistan telah melakukan kerjasama bilateral dengan ASEAN sekaligus menjadi melalui salah satu badan ASEAN yaitu ASOD. Negara – negara tersebut juga menjadi salah satu pemasok pendanaan untuk ASOD sendiri. Sedangkan kerjasama UNDCP (*United Nations International Drug Control Programme*) dan Uni Eropa dibangun ASEAN sebagai salah satu kerangka kerjasama *inter regional* dari organisasi kawasan tersebut. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan.⁴⁰ Keuntungan ini meliputi pertukaran informasi dan keahlian sehingga melalui kerjasama eksternal, ASEAN mampu menutupi dana yang selama ini menjadi faktor penghambat program ASOD.

4.2 Asean Senior Officials on Drug Matters 2011 – 2016

Berdasarkan ASOD Workshop pada tanggal 1 July 2009 di Ha Noi, Viet Nam, ASOD telah menghasilkan dan menyepakati *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 – 2015*. Pada Pertemuan Menteri ASEAN ke-33 pada Juli 2000, para delegasi menegaskan kembali kekhawatiran mereka tentang ancaman penyalahgunaan narkoba dan

⁴⁰ *Ibid.*



perdagangan narkoba pada keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN dan sepakat untuk memajukan tahun target untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba hingga 2015. Namun, pada pertemuan ASOD ke-28 di Hanoi diputuskan bahwa sebuah workshop yang akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia untuk mempertimbangkan laporan “*Drug – free ASEAN 2015: Status and Recommendations*” yang disiapkan oleh UNODC yang didanai oleh Pemerintah AS. Pada workshop ini, tujuan “*Drugs – Free ASEAN*” diuraikan menjadi “*A vision of a drug-free ASEAN*” yang kemudian diadopsi oleh *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC)* di Brunei Darussalam, 6 November 2007.⁴¹

28th ASOD Meeting sepakat bahwa visi ASEAN 2015 bebas narkoba adalah untuk berhasil dan efektif mengendalikan kegiatan narkoba dan mengurangi konsekuensi negatifnya kepada masyarakat. Ini termasuk pengurangan yang signifikan dan berkelanjutan dalam budidaya tanaman ilegal, pembuatan dan perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan kejahatan terkait narkoba dan serta prevalensi penggunaan narkoba.⁴²

Pertemuan ini menjadi landasan program kerja ASOD untuk mewujudkan ASEAN yang bebas dari drugs trafficking. Untuk mewujudkan tujuan “ASEAN Dugs free 2015”, Rencana Kerja ASEAN untuk memerangi produksi obat terlarang, perdagangan dan penggunaan telah dikembangkan dan akan memasukkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berikut:⁴³

1. Menetapkan garis dasar melalui format laporan negara yang terstandarisasi dan menggunakan data statistik 2008 yang disajikan pada

⁴¹ ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 – 2015.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*



pertemuan ASOD ke-30. Data harus dalam bentuk persentase sebagaimana berlaku

2. Melakukan tinjauan tahunan melalui Laporan Negara selama Pertemuan ASOD

3. ASOD akan melakukan Tinjauan Jangka Menengah pada tahun 2012

4. ASOD akan melakukan Penilaian Akhir pada tahun 2015 dan melakukan inventarisasi kegiatan berdasarkan *Work Plan*.

ASOD menjadi salah satu rezim yang bisa dianggap efisien dan memiliki cakupan yang kuat terhadap penanggulangan drug trafficking di Asia Tenggara.

Agenda *ASEAN Drug Free* pada tahun 2015 menjadi salah satu program efektif untuk seluruh anggota ASEAN dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi

ASEAN tahun 2015. Selain itu, tercapainya tujuan dari ASOD untuk Drug Free

ASEAN akan meningkatkan keamanan regional dan menjadi citra yang baik di mata dunia. ASOD Menjadi sambung tangan PBB untuk penanggulangan drug

trafficking di ASIA Tenggara yang disinyalir merupakan salah satu produsen narkoba ilegal terbesar di dunia. Kepentingan – kepentingan ASOD juga

merupakan kepentingan dari tiap negara anggotanya dimana ASOD sanggup mewadahi pertemuan untuk tiap delegasi tiap negara anggota dengan pertemuan

yang terstruktur. Selain itu sifat politis dari regional ASEAN sendiri yang *non intervention* bisa menjadi penghambat pemberantasan drugs trafficking di regional

ini. Disini ASOD menjadi wadah untuk merundingkan penanggulangan drug trafficking.



4.3 Dinamika Drugs Trafficking di Vietnam

Obat-obatan sebagian besar diperkenalkan di Vietnam selama Perang Amerika - Vietnam. Menurut laporan yang dibuat oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1971, 51% tentara Amerika di Vietnam telah merokok mariyuana, 31% telah menggunakan psikedelik seperti LSD, jamur mescaline dan psilocybin, dan tambahan 28% telah menggunakan obat-obatan keras seperti heroin dan kokain. Resep pil juga merajalela karena para jenderal percaya ini bisa meningkatkan kinerja. Meluasnya penggunaan narkoba sebagian besar disebabkan oleh kerusakan moral pasukan AS yang parah dan sebagai akibat dari gerakan kontra budaya yang terjadi di rumah.⁴⁴

Pada awalnya ganja menjadi salah satu jenis narkoba yang ditoleransi oleh komando militer (Amerika) tetapi setelah sebuah laporan yang ditulis oleh tentara John Steinbeck VI dan putra penulis pemenang hadiah nobel di Washingtonian Magazine memicu keributan publik. Namun hal ini menyebabkan peningkatan penggunaan obat yang lebih keras seperti heroin meningkat karena lebih sulit oleh kepolisian. Konsekuensi negatif dari hal ini sangat jelas dan seorang komandan militer dikutip mengatakan, "*If it would get them to give up the hard stuff, I would buy all the marijuana and hashish in the Delta as a present.*"⁴⁵ Meski pasukan Amerika akhirnya meninggalkan Vietnam narkoba tetap beredar. Ini adalah pengantar obat-obatan masif pertama ke masyarakat Vietnam.

Terdapat 2 jenis narkoba yang paling populer di Vietnam yaitu Heroin dan *Amphetamine Type Stimulants (ATS)*, sebagian besar produksi heroin diproduksi

⁴⁴ "Drugs in Vietnam", <https://conbeo.com/explore-vietnam/drugs-in-vietnam/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020

⁴⁵ *Ibid.*



dari wilayah Segitiga Emas (Thailand, Myanmar, Laos) meluas dari perbukitan Shan di Timur Laut Burma hingga ke Thailand Utara dan ke dataran tinggi Hmong di Laos. Akibatnya, sebagian dari proporsi ini diperdagangkan ke Vietnam dari Laos melalui jalur resmi internasional atau jalan yang tidak resmi. Secara historis, opium telah dibudidayakan dan digunakan oleh kelompok-kelompok etnis minoritas di daerah pegunungan dengan tujuan mempertahankan kebiasaan mereka dan menjadi metode penyembuhan masyarakat feodal.⁴⁶

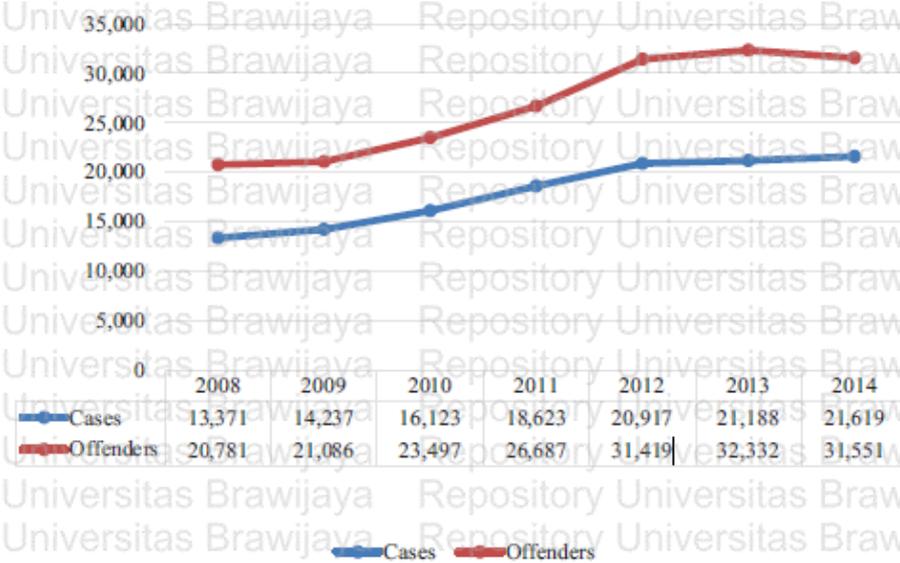
Heroin tidak menjadi perhatian luas lagi sampai tahun-tahun pertengahan 1990-an dengan jumlah besar yang berasal dari negara-negara Segitiga Emas dan Cina Selatan. Awalnya masuk ke Vietnam melalui koridor di utara Vietnam, dan dari sini diangkut ke selatan atau diekspor ke pasar Internasional.⁴⁷ Dewasa ini, dengan meningkatnya ketersediaan heroin dan turunnya harga pasaran di Vietnam, Vietnam dihadapkan pada meningkatnya jumlah anak muda yang menggunakan heroin. Lagi pula, terlepas dari kemunculan tiba-tiba berbagai jenis amfetamin, heroin masih menjadi masalah yang paling memprihatinkan di pasar obat-obatan terlarang di Vietnam

⁴⁶ Hai Tanh Luong, "Chapter 9, Drugs Trafficking Trend and It Response: A Case Study of Vietnam". Hal. 203.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 204.



Gambar 2. Data Kasus dan penangkapan terkait narkoba di Vietnam (2008-2014).



Sumber : Annual Reports of Vietnam at the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Fact Finding Committee (AIFOCOM)

Yang kedua adalah *Amphetamine Type Stimulants (ATS)*, *ATS* mencakup dua kelompok zat sintetik: zat-zat golongan amfetamin termasuk metamfetamin (metil-amfetamin), dan methcathinone; dan zat-zat kelompok ekstasi seperti MDMA (ekstasi). Produksi *ATS* dapat disesuaikan dan tempat untuk menghasilkannya mudah diubah dan dipindah. Dengan demikian, laboratorium *ATS* sering terletak di dekat pasar gelap dengan permintaan pasarnya. *ATS* bisa berupa berbagai bentuk seperti bubuk, pasta, cairan, tablet, atau kristal. Sampai saat ini, UNODC memperingatkan ekspansi cepat di pasar *ATS* global sejak 2009, dengan jumlah total *ATS* yang disita hampir dua kali lipat mencapai lebih dari 144 ton pada 2011 dan 2012, level tertinggi sejak mereka mulai melakukan pemantauan sistematis dan tetap relatif tinggi pada tahun 2013 secara regional.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* Hal 204.



Vietnam mengkhawatirkan bahwa perdagangan ATS telah meningkat dan Vietnam segera menjadi negara dengan tingkat konsumsi narkoba yang tinggi di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penyalahguna ATS telah meningkat pesat sejak 2008 dan telah melampaui opium sebagai obat kedua yang paling banyak digunakan di Vietnam sejak 2010. Oleh karena itu, bersama dengan heroin, ATS telah menantang bagi *Law Enforcement* Vietnam untuk mengendalikan narkoba dan memerangi ancaman mereka.

Vietnam juga merupakan salah satu negara yang masih mengejar perkembangan politik, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Namun, Vietnam juga telah mengakui bahwa untuk mengendalikan perdagangan narkoba menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam Program Nasional Pemerintah Vietnam sejak tahun 1993. Partai Komunis Vietnam selaku partai terbesar dan salah satu komponen dalam pengambilan keputusan di Vietnam telah mengadopsi dan mengumumkan pedoman untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba di Vietnam. *The National Strategy for Drug Prevention, Combat, and Control in Vietnam through 2020* dan berorientasi pada 2030 dianggap sebagai dokumen paling spesifik dari Vietnam untuk mengkonkretkan sudut pandang, target, dan solusi dalam pertempuran ini.⁴⁹

Otoritas Vietnam melalui perdana menteri Nguyen Tan Dung, menganggap bahwa investasi untuk pencegahan, pertempuran, dan pengendalian obat-obatan adalah investasi untuk pembangunan berkelanjutan negara dan oleh karena itu, diperlukan kesabaran, tekad dan koordinasi yang erat dari berbagai

⁴⁹ *Ibid.* Hal 211.



lembaga dan organisasi massa . Selain itu, Pemerintah Vietnam mengamankan mobilisasi sumber daya untuk pencegahan, memerangi, dan mengendalikan perdagangan narkoba sesuai dengan kapasitas dan kondisi sosial ekonomi di setiap tahap pembangunan, sambil meminta kontribusi dan bantuan dari komunitas internasional. The National Strategy melalui Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, menekankan bahwa strategi dan kebijakan mereka tidak hanya harus konkret untuk meningkatkan pengakuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan narkoba, pertempuran dan kontrol, tetapi juga mendorong sosialisasi dengan mendorong sektor, organisasi massa, sektor ekonomi, organisasi nonpemerintah, dan warga negara untuk melibatkan diri mereka sendiri. Selain itu, sebagai salah satu anggota positif di Asia Tenggara, Vietnam juga ingin meningkatkan kerja sama internasional dan implementasi komitmen internasional untuk pencegahan, memerangi dan mengendalikan narkoba sebagai tanggung jawab nasional.⁵⁰

Ancaman narkoba di Vietnam masih akan rumit karena situasi narkoba regional dan internasional. Perdagangan narkoba dapat secara teratur mengubah pendekatan, trik, batasan operasional, dan bekerja sama dengan lingkaran narkoba internasional di seluruh perbatasan Vietnam dengan tetangga-tetangganya. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan penjahat korup, lingkaran pencucian uang, dan pedagang senjata untuk berdagang dan memproduksi obat – obatan sintesis di dalam negeri. Jumlah orang yang tergantung pada obat-obatan sintesis, obat-obatan baru yang membuat kecanduan, dan jenis-jenis obat baru lainnya cenderung meningkat, terutama di kalangan anak muda dan pelajar di daerah

⁵⁰ *Ibid.* Hal 212.



perkotaan. Jika solusi jangka panjang tidak diadopsi dan diterapkan, serta peredaran narkoba di luar kendali, akan mengakibatkan konsekuensi serius dan tidak terduga bagi masyarakat. Dengan mengumumkan Strategi Nasional dengan target spesifik, program, dan solusi, Vietnam berharap menemukan cara yang efisien dan berkelanjutan untuk mencegah dan memberantas ancaman narkoba ilegal di masyarakat. Hal itu tidak hanya akan membantu pembangunan dan pengembangan Vietnam tetapi juga berkontribusi untuk membangun *Drug - Free Asean* di kawasan Asia Tenggara ketika ia menjadi satu Komunitas pada tahun 2020.⁵¹ Selain itu, didorong oleh penyebaran HIV yang cepat, tanggapan Vietnam terhadap penggunaan narkoba telah mengalami transformasi yang signifikan dalam dekade terakhir. HIV dan penggunaan narkoba epidemi telah mendapat perhatian politik tingkat tinggi di Vietnam. Perubahan kebijakan yang signifikan telah memungkinkan penerapan layanan pencegahan HIV dan ketergantungan obat. Namun demikian, ketidakkonsistenan antara kebijakan dan komitmen yang berkelanjutan untuk pusat perawatan wajib tetap sebagai hambatan utama untuk penyediaan layanan yang efektif bagi pengguna narkoba.⁵²

⁵¹ *Ibid.* Hal 213.

⁵² Thu Vuonga, Robert Ali, Simon Baldwina, Stephen Millsa "Drug policy in Vietnam: A decade of change?" hal. 1

BAB V

ANALISA VIETNAM DALAM KERJASAMA ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUG MATTERS TAHUN 2011 – 2016

Dalma memahami tentang pola interaksi suatu negara dengan negara lain, atau bentuk kerjasama dengan negara lain, suatu negara juga akan menyertakan kepentingan-kepentingan nasionalnya sebagai landasan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dan dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Kepentingan nasional sendiri memiliki definisi kepentingan yang harus dicapai suatu negara di tingkat domestik, dengan cara melakukan interaksi maupun kerjasama dengan negara-negara lain, agar dapat memenuhi kepentingan domestik dari suatu negara tersebut. Penulis akan menganalisa kepentingan nasional Vietnam dalam kerjasama ASEAN Senior Officials on Drug Matters dari tahun 2011-2016.

Penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional yang di tulis oleh K.J. Holsti yang penulis gunakan untuk menganalisa dan mengetahui apa saja kepentingan Vietnam dalam kerjasamanya bersama ASEAN Senior Officials on Drug Matters. Kepentingan ini nantinya akan dianalisa dengan mengacu pada konsep yang ditulis oleh Holsti yang menjelaskan kepentingan nasional melalui 3 poin yaitu, *core-interest and values*, *middle range objectives*, dan *long range goals*.



5.1. Core Interest and Values

Pada bagian ini penulis akan menganalisa apa kepentingan Vietnam dalam kerjasamanya bersama ASEAN Senior Officials on Drug Matters. Analisa ini nantinya akan membantu penulis untuk mengklasifikasikan kepentingan apa saja yang dibawa Vietnam dengan adanya 4 pilar dan pengembangan kerjasama yang dilakukan antar Vietnam dan ASEAN. Dan penulis akan lebih berfokus kepada bahasan apa yang menjadi kepentingan jangka pendek dari kepentingan nasional Vietnam dalam memperpanjang dan memperbaharui kebijakan kerjasama dengan ASOD pada tahun 2011-2016.

5.1.1. Self Preservation

Seperti yang di jelaskan diatas, *Self Preservation* adalah upaya yang dilakukan negara untuk mencapai suatu kepentingan yang dinilai sangat penting / urgent. Dengan indikator ini penulis akan menganalisa kepentingan apa yang harus segera dicapai oleh satu negara dengan berfokus kepada tindakan Vietnam melalui ASOD dalam memperbaiki dan menguatkan beberapa aspek seperti pertahanan, tatanan politik, dan perlindungan atas wilayah teritorinya. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kepentingan dalam hal self preservation penulis akan melihat apakah ada perbaikan dan penguatan sistem baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun pertahanan.

Ketika Vietnam memasuki dekade saat ini, Vietnam memiliki ambisi untuk menjadi negara industri modern, dengan tujuan keseluruhan meningkatkan PDB per kapita sebesar 70% pada tahun 2015, hingga 2.100 US Dolar per orang. Dalam mengejar tujuan ini, Pemerintah Vietnam bermaksud untuk mereformasi



dan memodernisasi pemerintahan, mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender, memerangi korupsi dan kejahatan, termasuk semua kegiatan terkait narkoba. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pengawasan obat bius bilateral dengan banyak negara di kawasan Asia, Pemerintah telah memperkuat tanggapan pencegahan dan penindasan untuk melawan kegiatan perdagangan narkoba, baik domestik maupun internasional. *Law Enforcement Agencies (LEA)* Vietnam telah menerapkan langkah-langkah ketat untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menuntut para sindikat yang secara ilegal menjual narkoba di jalur darat, laut, dan udara. Terlepas dari itu, upaya-upaya ini belum efektif secara finansial dan teknis untuk mengatasi tantangan yang muncul dan modus operandi para pengedar narkoba yang semakin canggih.⁵³

Vietnam telah beberapa kali mengajukan kepentingannya di ASOD tertuang pada The 21st Meeting of ASEAN Senior Officials on Drug Matters dimana Vietnam mengajukan Rencana Aksi *Hanoi Plan of Action* untuk mengimplementasikan Program Kerja ASEAN Mengoperasionalkan Rencana ASEAN Aksi Pengendalian Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2004.⁵⁴

Selain itu Vietnam juga mengajukan permasalahan narkoba domestiknya dan negara negara di ASEAN yang menjangkit di kalangan pemuda. Hal ini tertuang dalam *The Regional Conference on Drug Abuse Among the Youth Hanoi, Viet Nam, 26-27 November 1998*. Menteri Keamanan Publik dan Wakil Ketua Komite Pengendalian Narkoba Nasional Vietnam, menunjukkan bahwa dengan semakin seriusnya penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan kaum

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Press Release The 21st Meeting of ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), Jakarta.*



muda di kawasan ini, Konferensi Regional menawarkan kesempatan tepat waktu bagi para anggota untuk membahas cara-cara dan sarana untuk lebih meningkatkan upaya kerja sama regional untuk mengatasi masalah tersebut.⁵⁵

Beberapa hal tersebut masih menjadi langkah preventif Vietnam di dalam ASOD hingga tahun 2015, dimana Vietnam ikut menyetujui ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 – 2015.

Perdagangan narkoba ilegal yang masuk ke Vietnam memang mengurangi kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa angka kematian di Vietnam disebabkan oleh aktifitas yang berhubungan dengan narkoba. Terlepas dari itu, hal ini tidak sampai mengganggu stabilitas dari Vietnam sendiri, meskipun sepanjang tahun 2011 – 2016 sendiri tingkat penggunaan narkoba mengalami peningkatan. Selama periode tersebut Vietnam dan ASOD sedang merealisasikan tujuan dari *ASEAN Work Plan on Combatting Ilicit Drugs*. Serta terdapat langkah preventif domestik yaitu *National Committee on Aids, Drugs and Prostitute Control of Vietnam* yang dalam hal ini ASOD hanya membantu Vietnam sesuai koridor tugas dari ASOD sendiri.

Indikator *self preservation* sendiri disini Vietnam sendiri kurang mendapatkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan Vietnam harus membuat aturan domestik sendiri. Dengan maupun tanpa ASOD Vietnam akan tetap menerapkan *National Committee on Aids, Drugs and Prostitute Control of Vietnam*. Vietnam sendiri hanya mendapatkan turunan program dari *ASEAN Work*

⁵⁵ *The Regional Conference on Drug Abuse Among the Youth*, diakses dari https://asean.org/?static_post=the-regional-conference-on-drug-abuse-among-the-youth-ha-noi-viet-nam-26-27-november-1998-2 pada tanggal 6 Juli 2020.



Plan on Combatting Ilicit Drugs . Selain itu jumlah dari perputaran narkoba di Vietnam tidak menurun, meskipun bisa sedikit di kendalikan.

5.1.2. Defence of Strategical Vital Areas

Dalam variabel Defence of Strategically Vital Areas akan menjelaskan tentang kontrol dan akses terhadap aset sumber daya ataupun wilayah-wilayah vital dimana wilayah tersebut sangat vital dan dapat meningkatkan kapabilitas dari suatu negara. Hal ini juga tentunya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, ketika ancaman yang masuk ke dalam suatu negara sifatnya eksternal maka suatu negara pun harus dapat memegang kontrol wilayah di dalam maupun di luar teritorinya. Ketika ancaman berasal dari eksternal atau wilayah luar teritorinya maka negara itu juga harus memegang kendali atas wilayah yang menjadi sumber permasalahan karena dapat berimbas tidak hanya pada satu negara. Imbasnya akan berdampak kepada dua negara yang teritorinya berdekatan.

Perdagangan narkoba ilegal di perbatasan adalah salah satu ancaman utama bagi keamanan manusia, karena dapat menimbulkan dampak bagi perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perdagangan narkoba ilegal di perbatasan sendiri merupakan bahaya global, yang menimbulkan ancaman tidak hanya bagi masing-masing negara tetapi juga bagi komunitas negara bagian di kawasan. Tantangan regional terhadap hal ini tidak dapat diatasi secara efektif tanpa kerja sama lintas batas yang erat antara polisi dan unsur-unsur lain dari sistem peradilan regional, seperti badan perbatasan dan bea cukai, jaksa penuntut, dan hakim.⁵⁶ Menggaris bawahi *Golden Triangle* sebagai zona produsen perdagangan narkoba ilegal, yang bisa dilihat juga zona ini berbatasan langsung

⁵⁶ Hai Tnah luong, "Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam–Laos Border" hal. 149.



dengan Vietnam, diperlukan monitoring dan mediasi ASEAN melalui ASOD dengan negara negara di sekitar Vietnam sendiri. Di perbatasan Vietnam dan Laos, khususnya di titik segitiga di wilayah barat laut antara Son La, Dien Bien, dan Lai Chau, Vietnam menghadapi beberapa tantangan dalam menanggapi perdagangan narkoba transnasional dari zona pasar *Segitiga Emas*⁵⁷. Sebagian besar pelaku perdagangan narkoba mengambil keuntungan dari kondisi geografis, topografi, dan iklim yang sulit di lintas perbatasan Vietnam - dengan Cina di utara dan Kamboja di selatan - yang menyediakan banyak jalur untuk perdagangan narkoba ilegal.

Kontribusi ASOD dalam mengatasi ini pada tahun 2011 – 2016 adalah menjadi wadah untuk pertemuan tingkat tinggi negara - negara di ASEAN, termasuk Vietnam. Agenda tersebut memiliki tujuan untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan transnasional yang masuk ke Vietnam. Selain sesi pleno, Pertemuan ASOD ke-39 juga membahas lima hal: pendidikan preventif; detoksifikasi dan rehabilitasi; penelitian; penegakan hukum; dan pengembangan obat pengganti. Oleh karena itu, ASEAN harus memiliki pendekatan yang seimbang terhadap kebijakan obat-obatan, menjaga konsensus kebijakan, memperkuat solidaritas dan kerja sama internal, menghubungkan penerapan program dan inisiatif kerja sama, dan mempromosikan kerja sama dengan negara-negara non-ASEAN, terutama mitra dialog.⁵⁸

⁵⁷ Hai Tanh Luong, "Vietnam and the Mekong's Synthetic Drugs Epidemic", <https://thediomat.com/2019/05/vietnam-and-the-mekongs-synthetic-drug-epidemic/> diakses pada 5 juli 2020 pada pukul 21.00.

⁵⁸ Hai Tanh luong, "Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam–Laos Border" hal. 148.



Dalam indikator ini Vietnam bersama sepanjang tahun 2011 - 2016 telah berupaya melakukan tindak preventif untuk mengantisipasi banyaknya penyelundupan narkoba yang masuk ke Vietnam terutama dari perbatasan negara dengan Laos. Vietnam berusaha melindungi area-area vital yang ada di negaranya dan dimediasi oleh ASOD.

5.1.3. Ethnic, Religous, or Linguistic Unity

Karena seringkali stabilitas negara dapat terganggu dengan adanya konflik-konflik yang muncul seperti adanya diskriminasi antar suku dan agama lain, dan perbedaan budaya yang diyakini yang pada akhirnya menyebabkan konflik-konflik tertentu. Penting bagi negara untuk menjaga stabilitas dari warga negaranya sendiri sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi, dan biasanya daerah yang berbatasan dengan negara lain atau teritori lain sangat sering terjadi konflik.

Berhubungan dengan perdagangan narkoba ilegal di perbatasan, masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan Laos menjadi komunitas yang rentan terdampak perdagangan narkoba di perbatasan seperti kelompok etnis minoritas Mong dan Dao di Dienbien, Sonla, dan Nghean yang berbatasan langsung dengan Laos. Namun tak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di kota yang lebih besar, modern, dan pusat dari negara Vietnam sendiri menjadi korban perdagangan narkoba ilegal ini. Bahkan mayoritas konsumen dari perdagangan narkoba ini adalah mayoritas masyarakat kota di Hanoi dan Ho Chi Minh.

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengungkapkan, dalam hal membangun zona bebas narkoba di komunitas lokal, pemerintah Vietnam di semua tingkatan, termasuk kantor pusat, provinsi, kabupaten dan komunitas,



untuk menjaga 70% komunitas, lingkungan dan daerah perumahan serta 90% dari agensi pemerintahan, organisasi, unit tentara, bisnis, dan sekolah yang bebas dari ancaman narkoba.⁵⁹ Terkait dengan kekhawatiran para pecandu narkoba, Strategi Nasional mengharapkan untuk mengurangi setidaknya 30-40% dari jumlah pecandu narkoba di Vietnam Selanjutnya, 100% dari pecandu terdeteksi dan dikelola; 90% dari mereka dirawat, didetoksifikasi dan diberikan pelatihan kejuruan; 100% pecandu di pusat-pusat penahanan, pendidikan dan rehabilitasi didetoksifikasi; menarik tingkat readdiction obat ke 10-15% dibandingkan dengan angka saat ini.

Langkah ASOD yang tidak mengintervensi Law Enforcement di Vietnam mengakibatkan dampak yang tidak signifikan dalam konteks *ethnicity*. karena tidak adanya social order tertentu untuk melindungi suku, agama dan ras tertentu yang berada di wilayah perbatasan, Vietnam tidak memerlukan intervensi ASOD dalam menangani urusan perdagangan narkoba ilegal di perbatasan. Permasalahan utama adalah kedaulatan, bila membahas tentang perdagangan narkoba ilegal di perbatasan. Lemahnya integritas aparat dan minimnya sosialisasi dan edukasi, hal ini menjadi celah untuk *drugs traffickers* untuk masuk melalui perbatasan yang lemah tersebut. Sedangkan untuk territorial order sendiri hal ini bertujuan untuk memperkuat batas negara demi meminimalisir angka narkoba yang masuk ke Vietnam dan yang menjadi prioritas bagi Vietnam sendiri adalah untuk mengatasi masuknya Narkoba, tanpa terkecuali, ke negaranya.

⁵⁹ Hai Tanh Luong, "Chapter 9, Drugs Trafficking Trend and It Response: A Case Study of Vietnam". Hal. 212.



5.2. Middle Range Objective

Middle Range Objective merupakan variabel yang levelnya berada dibawah variabel core interest and values dimana seringkali dideskripsikan sebagai kepentingan jarak menengah karena dalam variabel ini berfokus kepada peningkatan kemampuan, peningkatan nama baik, dan untuk menyediakan kepentingan phak-pihak tertentu seperti dalam kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, disini kepentingan dari negara/pihak lain juga harus diperhatikan demi tercapainya win-win solution bagi kedua negara tersebut. Agar kepentingan ini tercapai, perlu waktu yang dirasa tidak sedikit, karena adanya kepentingan dari pihak-pihak lain yang harus dipenuhi dan jangkauannya lebih luas karena level analisisnya makin luas seperti kesepakatan yang akan dicapai dalam kerjasama bilateral, multilateral atau regional. Pnuls ingin melakukan identifikasi terkait kepentingan jarak menengah Vietnam dalam kerjasamanya dengan Asean Senior Officials on Drug Matters. tahun 2011-2016 berdasarkan indikator *private citizen's interest, state prestige, self extension, dan promoting human rights*.

5.2.1 Private Citizen Interest

Dalam pemerintahan suatu negara, biasanya menjalin kerjasama dengan negara-negara tertentu, atau firma-firma tertentu yang berinvestasi di negaranya. Dalam hal ini pemerintah juga harus befokus menjaga agar aliran dana dari investasi dan firma-firma swasta yang berinvestasi di negaranya tetap bertahan, dan hal ini pun dapat direalisasikan dengan menggunakan power dari negara tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di negaranya, ketika ada ancaman seperti drugs trafficking disini akan menyebabkan instabilitas ekonomi di negaranya, yang mebuat investor pun akan berpikir dua



kali untuk melakukan investasi jangka panjang di suatu negara. Pemerintah juga harus menjaga konektivitas dan kestabilan ekonomi dari negaranya, sehingga ketika ada ancaman yang masuk entah dari dalam maupun luar teritorinya bila diperlukan, negara dapat menurunkan pasukan untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi demi menjaga stabilitas dan keamanan, baik bagi negaranya sendiri maupun pihak-pihak lain yang ada di negaranya.

Sepanjang tahun 2011 – 2016, Vietnam sendiri tidak memiliki tujuan untuk pemenuhan kepentingan dalam firma-firma yang ada di negaranya. Dalam kerjasama ASOD sendiri sepanjang tahun 2011 – 2016, Vietnam hanya berfokus pada tindak pencegahan masuknya Narkoba dan mengatasi permintaan yang tinggi terhadap narkoba pada masyarakat Vietnam. Salah satu agenda yang ingin dilindungi oleh Vietnam adalah hubungan baik antara negara negara Asia Tenggara dengan dalih kerjasama ekonomi mereka dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Melalui ASOD sendiri Vietnam tidak berfokus pada perlindungan firma-firma yang terkait melainkan melindungi kestabilan nasionalnya.

Hal diatas dikarenakan tidak banyak bentuk investasi yang dilakukan oleh Vietnam melalui ASOD pada kurun waktu itu. Vietnam hanya membantu ASOD melalui pendanaan yang diberikan dan disepakati dalam ASOD Work Plan. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan Vietnam hanyalah menjaga kemitraan dengan negara – negara ASEAN terutama yang berbatasan langsung seperti Laos dan Cina bagian Selatan, untuk penanggulangan narkoba dan berbagi data tentang aktifitas perdagangan narkoba di regional Asia Tenggara. Tidak ada firma-firma khusus yang menjadi fokus bagi Vietnam sendiri dalam ASOD menyebabkan



tidak terpenuhinya indikator ini. Vietnam melalui Merida hanya memiliki tujuan untuk mengurangi narkoba yang masuk dan menekan angka permintaan yang tinggi terhadap narkoba terutama secara domestik

Dari penjelasan Vietnam pada tahun 2011 – 2016 tidak berfokus untuk melindungi firma-firma terkait. Tujuan utama dari Vietnam sendiri adalah untuk mengurangi angka narkoba yang masuk ke Vietnam. Secara politis, Vietnam mungkin ingin menjaga relasi dengan negara – negara di Asia Tenggara untuk menjaga pola interaksi perdagangan dan sebagai gantinya melalui ASOD Vietnam berusaha memperbaiki permasalahan narkoba yang ada di Asia Tenggara.

5.2.2. Stage Prestige

Sebuah negara dalam membina relasi dan melakukan interaksi dengan negara lainnya tentunya akan membawa nama baik dari negaranya, dan juga mempertimbangkan nama baik negara yang akan diajak kerjasama. Maka dari itu faktor nama baik negara ini juga mempengaruhi dan harus dijaga oleh negara itu sendiri. Suatu negara berupaya menjaga nama baik bisa dilihat dari peningkatan kemampuan negara dalam bidang tertentu seperti peningkatan dalam sektor diplomatik, ekonomi, pengembangan industri, militer, serta aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perdagangan Narkoba dan kejahatan transnasional menjadi akar permasalahan regional Asia Tenggara, dimana akibat aktivitas ini stabilitas kawasan dan beberapa negara menjadi tidak stabil. Vietnam menjadi korban ketidakstabilan kondisi negara dikarenakan komoditas yang masuk ke Amerika Serikat 90% berasal dari wilayah Cina, Singapura, dan Laos. Karena negara



negara tersebut berbatasan langsung dengan Vietnam, negara - negara ini melalui ASOD berusaha untuk mengatasi kejahatan transnasional yang ada di Vietnam.

Selama ini paham War on Drugs sendiri sudah dianut dan ada sejak awal abad 21 oleh Vietnam. Bukan hal baru Vietnam beresiko untuk menjadi pusat transit narkoba. Di perbatasan Vietnam dan Laos, khususnya di titik segitiga di wilayah barat laut antara Son La, Dien Bien, dan Lai Chau, Vietnam menghadapi beberapa tantangan dalam menanggapi perdagangan narkoba transnasional dari zona pasar *Segitiga Emas*⁶⁰. Selain itu, didorong oleh penyebaran HIV yang cepat pada akhir abad 20, tanggapan Vietnam terhadap penggunaan narkoba telah mengalami transformasi yang signifikan dalam dekade terakhir. HIV dan penggunaan narkoba epidemi telah mendapat perhatian politik tingkat tinggi di Vietnam. Perubahan kebijakan yang signifikan telah memungkinkan penerapan layanan pencegahan HIV dan ketergantungan obat.⁶¹

Vietnam telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) rata-rata 7,25%, pada 2010 pendapatan rata-rata per kapita mencapai 1.200 US Dolar naik dari kurang dari 400 US Dolar pada tahun 2000. Hanya dalam dua dekade, Vietnam berubah dari ekonomi miskin dan terbelakang menjadi status negara berpenghasilan menengah dan memperbaiki kondisi kehidupan jutaan orang. Selain itu, secara umum, Vietnam telah memenuhi sebagian besar Milenium Development Goals. Ketika Vietnam memasuki dekade saat ini, Vietnam memiliki ambisi untuk menjadi negara industri modern, dengan tujuan keseluruhan meningkatkan PDB per kapita sebesar 70% pada tahun 2015,

⁶⁰ Hai Tanh Luong, *op.cit*

⁶¹ Thu Vuonga, *op.cit*.



hingga 2.100 US Dolar per orang. Dalam mengejar tujuan ini, Pemerintah Vietnam bermaksud untuk mereformasi dan memodernisasi pemerintahan, mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender, memerangi korupsi dan kejahatan, termasuk semua kegiatan terkait narkoba. Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pengawasan obat bius bilateral dengan banyak negara di kawasan Asia, Pemerintah telah memperkuat tanggapan pencegahan dan penindasan untuk melawan kegiatan perdagangan narkoba, baik domestik maupun internasional.⁶²

Dalam indikator ini Vietnam mendapatkan nama baik karena Vietnam disini tetap konsisten dalam mempertahankan paham *War on Drugs* yang sudah ada sejak awal bergabungnya dengan ASOD. Selain itu hal ini juga membuat hubungan Vietnam dengan negara negara di Asia Tenggara dan dunia menjadi lebih baik. Ini juga memperbaiki citra dan meningkatkan nama baik Vietnam dalam kontribusinya meningkatkan keamanan regional, melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters*.

5.2.3. Self Extension

Indikator self extension memaparkan bahwa upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya, atau bisa juga dibidang sebagai tuntutan negara terhadap teritorial di luar wilayah kekuasaannya. Konsep ekspansi sendiri memiliki banyak makna, ekspansi dapat diartikan sebagai proses akuisisi suatu wilayah diluar wilayah negara tersebut guna untuk memperluas kekayaan dan power dari negara tersebut, dilain sisi disini penjelasan tentang ekspansi tidak hanya tentang akuisisi wilayah negara lain, ekspansi sendiri dapat

⁶² Hai Tanh Luong, *op.cit.*



diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah atau teritori negara lain untuk mencapai kepentingan negaranya.

Vietnam di dalam kerjasamanya dengan ASOD tidak berupaya untuk melakukan ekspansi wilayahnya. Selain itu ASOD tidak mewedahi kepentingan ekspansionis dari suatu negara. Meskipun kepentingan keamanan di perbatasan dimana marak terjadi *drug trafficking*, Vietnam tidak berupaya untuk memperluas wilayah negaranya untuk penanggulangan kasus *drug trafficking* di perbatasan, terutama perbatasan langsung dengan zona *Golden Triangle*.

Peran ASOD tertuang dalam “ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug and Illicit Trafficking” yang berisikan tiga variabel utama yaitu kebijakan, pendekatan, dan strategi. Peran ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitaskan, serta memberikan saran terkait penanggulangan peredaran narkotika. ASOD berperan sebagai badan informasi negara anggota dalam mendapatkan informasi terkait dengan kondisi *drugs trafficking* di luar kawasan. Hal ini dikarenakan ASEAN memiliki hubungan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti kerjasama dengan badan yang menangani masalah *drugs trafficking* di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Dengan adanya kerjasama tersebut, informasi ini dapat memperkecil terjadinya perkembangan *drugs trafficking*. Pada tanggal 25-26 Agustus 2008, ASOD mengadakan pertemuan ke-29 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada pertemuan yang dilakukan telah menghasilkan beberapa rekomendasi dari kelompok kerja (*Working Groups*) sebagai berikut⁶³ :

⁶³ ASEAN *Selayang Pandang Edisi ke-19* (Jakarta, 2010), halaman 153.



a. *Alternative Development*

b. *Preventive Education*

c. *Treatment and Rehabilitation*

d. *Law Enforcement*

e. *Research.*

Dengan kata lain, dalam indikator ini Vietnam tidak memiliki kepentingan ekspansi wilayah untuk menanggulangi permasalahan *drugs trafficking*.

5.2.4. Promoting Human Right

Dalam Indikator ini menjelaskan apakah ada atau tidaknya nilai-nilai kemanusiaan yang terpenuhi dalam suatu hubungan internasional atau kerjasama yang dilakukan 2 negara atau lebih. Indikator ini menjelaskan bahwa dalam suatu kerjasama internasional, adakah upaya dari suatu negara untuk mempromosikan isu tentang HAM, atau dalam isu yang dibahas adakah nilai-nilai HAM yang dijunjung disini, karena suatu negara juga harus dapat melihat apakah disini kebijakan yang diambil negara sudah sesuai dengan nilai kemanusiaan dan hal ini juga bersangkutan dengan hak-hak masyarakat yang ada dan menempati negara tersebut.

Vietnam sedang mengalami transformasi yang lambat, tetapi signifikan dari salah satu negara dunia yang “lebih menghukum” terhadap penggunaan narkoba ilegal hingga yang mulai memasukkan pendekatan pengurangan tindakan



represif ke dalam kebijakan narkotikanya. Ini juga salah satu dari sedikit negara yang telah menekan produksi ilegal dan penanaman opium.⁶⁴

Vietnam juga merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan represif terhadap *drugs trafficking*. Hal ini seringkali bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Di antara kebijakan yang paling merugikan dan bermasalah adalah penahanan pengguna narkoba di pusat perawatan wajib dan stigmatisasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh polisi. Pemerintahan Komunis Vietnam pada awal 1990-an menetapkan obat-obatan terlarang sebagai “kejahatan sosial” untuk diberantas melalui cara-cara hukuman dan seringkali represif. Tapi, implementasi dari pendekatan pengurangan dampak buruk baru-baru ini telah mengurangi tingkat transaksi narkoba ilegal yang juga berdampak pada peningkatan kasus HIV / AIDS pada masa itu.⁶⁵

Untuk menghilangkan beberapa kontradiksi ini, UU tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika diubah pada tahun 2008 untuk memberikan dukungan bagi langkah-langkah pengurangan dampak buruk sebagaimana diatur dalam UU Pencegahan dan Pengendalian AIDS / HIV. Dan pada 2009, Pidana kode diubah untuk mengkarakterisasi pengguna narkoba sebagai pasien dan bukan penjahat. Sementara beberapa akademisi telah menafsirkan ini sebagai dekriminialisasi konsumsi obat, *Ordinance on Administrative Violations* terus mengkategorikan penggunaan narkoba sebagai pelanggaran administratif dan pengguna masih sering dikirim ke pusat perawatan

⁶⁴ James Windle, “A Slow March from Social Evil to Harm Reduction: Drugs and Drug Policy in Vietnam”. Hal. 5

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 2.



obat wajib dan dipenjara di sana. Bahkan, di bawah regulasi ini, polisi merasa berkewajiban untuk menangkap dan memenjarakan pengguna narkoba.

Program ASOD yang sedang dicanangkan pada tahun 2011 – 2016 berperan menjadi media untuk mendapatkan citra positif dalam masalah penanganan narkoba di Vietnam. Adanya program edukasi, sosialisasi, dan laporan data tentang aktifitas perdagangan narkoba ilegal menjadi hal yang strategis untuk Vietnam untuk membuat kebijakan yang lebih efektif juga dalam penanganan kasus narkoba di Vietnam. Dengan menjadi bagian dari ASOD, Vietnam terbukti berusaha untuk mengembangkan keefektifitasan penanganan *drug trafficking* termasuk penanganan yang lebih aman untuk korban dari narkoba ilegal ini sendiri.

5.3 Long Range Goals

Long range objectives merupakan variabel yang berisi kepentingan jangka panjang negara dalam melakukan kerjasama/interaksi dengan negara lain. Kepentingan tersebut merupakan salah satu kepentingan yang sulit untuk tercapai karena ketidakpastian durasi dan waktu yang harus dihabiskan oleh negara. Kepentingan ini sering kali menjadi goal akhir bagi negara karena didalam kepentingan ini terdapat indikator new order dimana dalam indikator tersebut dijelaskan bahwa kepentingan ini digunakan oleh negara untuk mencapai cita-cita, tujuan jangka panjang dan pada kepentingan ini dijelaskan bahwa negara berupaya merubah tatanan atau sistem internasional sesuai dengan keinginan, visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Di dalam variabel ini penulis ingin melihat bagaimana Vietnam dalam bekerja sama dengan ASOD



mencapai dan merekonstruksi sistem internasional dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang sesuai dengan kepentingan Vietnam sendiri.

Sepanjang 2011 – 2016, belum terlihat bagaimana Vietnam dalam merekonstruksi sistem yang ada. Vietnam dan ASOD masih beracuan pada “*Drug – free ASEAN 2015: Status and Recommendations*” yang disiapkan oleh UNODC dan *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2015-2025*.

Secara domestik Vietnam juga masih beracuan pada *The National Strategy of Combating Illicit Drugs Vietnam*. Semua *goals* dari strategi nasional dan regional ini sifatnya berjangka panjang hingga tujuannya adalah ASEAN Drugs Free 2015 – 2025.

Dari Indikator diatas ditemukan bukti bahwa Vietnam dan ASOD masih menggunakan kebijakan yang berlaku selama ini untuk mengantisipasi drugs trafficking. Program dari ASOD juga bersifat jangka panjang dan Vietnam membutuhkan ini untuk penanggulangan drugs trafficking di negaranya.



BAB VI

KESIMPULAN

Vietnam selama tahun 2011 – 2016 telah memenuhi beberapa kepentingannya seperti mendapatkan bantuan dana penanggulangan narkoba ilegal dari ASOD, menurunkan tingkat kecanduan melalui program – program ASOD agar permintaan dari masyarakat tidak tinggi, dan menjadi media komunikasi multilateral dengan negara negara di Asia Tenggara terutama untuk mengatasi masuknya narkoba ilegal dari *Golden Triangle* dan Cina. Selama tahun 2011 – 2016 sendiri dalam hal penanganan narkoba di Vietnam, negara – negara anggota ASOD sepakat untuk mengurangi tingkat agresifitas dari penanggulangan aktivitas perdagangan narkoba. Hal tersebut dibuktikan disepakatinya *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2015-2025* dan belum ada rekonstruksi program.

Selama tahun 2011 – 2016 agenda ASOD kepentingan Vietnam sendiri dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan jangka panjang (*Long Range Goals*). Menurut konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti disini Vietnam optimis akan memenuhi kepentingannya di variabel *Long Range Goals*. *Long Range Goals* ini didefinisikan sebagai kepentingan sekunder atau opsional yang bukan merupakan kepentingan yang menjadi fokus utama dari kepentingan suatu negara. Terdapat beberapa hal juga terlepas dari *Long Range Goals* yang mengindikasikan bahwa dari hasil kerjasama *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* ini dapat memenuhi kepentingan nasional dari Vietnam. Di lain indikator



Vietnam juga mempunyai kepentingan nasional lain namun tidak begitu seperti indikator *state prestige, promoting human rights*, dan *Defence of Strategical Vital Areas*.

Dalam indikator *State Prestige* sendiri Vietnam mendapatkan nama baik karena Vietnam disini tetap konsisten dalam mempertahankan paham *War on Drugs* yang sudah ada sejak awal bergabungnya dengan ASOD. Selain itu hal ini juga membuat hubungan Vietnam dengan negara negara di Asia Tenggara dan dunia menjadi lebih baik. Ini juga memperbaiki citra dan meningkatkan nama baik Vietnam dalam kontribusinya meningkatkan keamanan regional, melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters*.

Sedangkan menurut indikator *promoting human rights*, Program ASOD yang sedang dicanangkan pada tahun 2011 – 2016 berperan menjadi media untuk mendapatkan citra positif dalam masalah penanganan narkoba di Vietnam. Adanya program edukasi, sosialisasi, dan laporan data tentang aktifitas perdagangan narkoba ilegal menjadi hal yang strategis untuk Vietnam untuk membuat kebijakan yang lebih efektif juga dalam penanganan kasus narkoba di Vietnam. Dengan menjadi bagian dari ASOD, Vietnam terbukti berusaha untuk mengembangkan keefektifitasan penanganan *drug trafficking* termasuk penanganan yang lebih aman untuk korban dari narkoba ilegal ini sendiri.

Dalam indikator *Defence of Strategical Vital Areas*, Vietnam bersama ASOD sepanjang tahun 2011 - 2016 telah berupaya melakukan tindak preventif untuk mengantisipasi banyaknya penyelundupan narkoba yang masuk ke Vietnam terutama dari perbatasan negara dengan Laos. Vietnam berusaha melindungi



area-area vital yang ada di negaranya dan dimediasi oleh ASOD. Vietnam memerlukan forum untuk membicarakan kebijakan penanggulangan *drugs trafficking* agar tidak terbatas oleh prinsip *non intervention*. Hal ini bisa menjadi acuan tiap negara di Asia Tenggara untuk memperketat perbatasannya dari masuknya narkoba ilegal sehingga *goals* dari *ASEAN Drugs Free 2015 – 2025* bisa tercapai.

Selama kerjasama *ASEAN Senior officials on Drug Matters* di tahun 2011 – 2016 sendiri, dari analisa yang penulis lakukan disini Vietnam kurang mendapatkan kepentingannya dalam variabel *Core Interests and Values*, dan *Middle Range Objective*. variabel tersebut menjelaskan tentang kepentingan jangka pendek dan jangka menengah dari interaksi yang dilakukan oleh negara dalam satu bentuk kerjasama. Kepentingan jangka pendek Vietnam sendiri dilakukan tanpa campur tangan ASOD untuk mengurangi angka narkoba yang masuk serta mengurangi angka permintaan dan kecanduan yang tinggi di negaranya. Menurut indikator tersebut hal ini tidak sesuai dengan indikator dari variabel *Core Interests and Values* sesuai dengan konsep kepentingan nasional oleh K.J. Holsti. Selama tahun 2011 – 2016 sendiri Vietnam dalam ASOD tidak berusaha memenuhi kepentingan jangka pendek atau jangka menengah yang dijelaskan oleh Holsti, meskipun beberapa aspek dari indikator yang terpenuhi. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2011 – 2016 Vietnam dan ASOD sendiri lebih berfokus pada sosialisasi, konsolidasi, perbaikan sistem perbatasan dan pertemuan dengan negara negara anggota ASOD saja.

DAFTAR PUSTAKA

AIPA.

<http://www.aipasecretariat.org/wp-content/uploads/2011/09/Vietnam-Country-Report.pdf>. Accessed 2 April 2019.

Anggraini, Devi. “Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara.”

<http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf>. Accessed 2 April 2019.

ASEAN. “ASEAN One Vision One Identity One Community, “Plan of Action on Drug Abuse Control.””

https://asean.org/?static_post=plan-of-action-on-drug-abuse-control. Accessed 5 Juli 2020.

ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. 19 ed., Jakarta, ASEAN Sekretariat, 2010.

ASEAN. *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009 – 2015*. ASEAN Sekretariat.

ASEAN. *Press Release The 21st Meeting of ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. 21 ed., DKI Jakarta, ASEAN Sekretariat.

ASEAN. “The Regional Conference on Drug Abuse Among the Youth.”

https://asean.org/?static_post=the-regional-conference-on-drug-abuse-among-the-youth-ha-noi-viet-nam-26-27-november-1998-2.

ASEAN Senior Officials on Drugs Matters.

<https://asean.org/asean-political-security-community/asean-ministerial-me>



etings-drugs-ammd/asean-senior-officials-drug-matters-asod/. Accessed 2 April 2019.

Association of Southeast Asian Nations. *The ASEAN Charter In English and ASEAN Languages*. Jakarta, ASEAN Sekretariat, 2012.

Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Plan of Action*. Jakarta, ASEAN Sekretariat, 1994.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam hal Kerjasama Pengendalian

Narkoba dan Obat-obatan." *Pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam hal Kerjasama Pengendalian Narkoba dan Obat-obatan*, BNN RI, 2010,

https://bnn.go.id/blog/siaranpers/pertemuan_asean_senior_officials_on_drug_matters_asod_dalam_hal_kerjasama_pengendalian_narkoba_dan_obat-obatan_. Accessed 5 Juli 2020.

CIA. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>.

Accessed 2 April 2019.

Conbeo. "Dugs in Vietnam." *Drugs in Vietnam*,

<https://conbeo.com/explore-vietnam/drugs-in-vietnam/>. Accessed 5 Juli 2020.

Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN. *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasiona*. Jakarta, DEPLU RI, 2000.

Donnelly, Jack. "Realism and International Relations" Cambridge University

Press." 2000. Accessed 2 April 2019.



Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey, Prentice Hall, 1967.

Holsti, K. J. *International Politics: A Framework for Analysis, Fifth Edition*. 5 ed., New Jersey, Prentice Hall, 1988.

Hughes, Mark C. "Merida Initiative and Effectiveness: An Analysis of Supply-Side Policy.(Naval Post Gradual School (Monterey California).” *Merida Initiative and Effectiveness: An Analysis of Supply-Side Policy*, 2013, <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a584082.pdf>. Accessed 8 September 2019.

Luong, Hai Tanh. *Vietnam and the Mekong's Synthetic Drugs Epidemic*, <https://thediplomat.com/2019/05/vietnam-and-the-mekongs-synthetic-drug-epidemic/>. Accessed 5 Juli 2020.

Luong, Hai Tanh. *Vietnam and the Mekong's Synthetic Drugs Epidemic*, <https://thediplomat.com/2019/05/vietnam-and-the-mekongs-synthetic-drug-epidemic/>. Accessed 5 Juli 2020.

Luong, Hai Tanh. *Chapter 9: Drug Trafficking Trends and Its Responses: A Case Study of Vietnam*. Accessed 2 April 2019.

Luong, Hai Tanh. *Transnational Drug Trafficking Across the Vietnam–Laos Border*.

Mas'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Pustaka LP3S, 1994.

Mingst, Karen A., and M. Arreguin Toft. *Essentials of International Relations*. 7 ed., W.W Norton & Company, 2017.



Nieuwkerk, Anthony Van. "South Africa's National Interest: African Security Review. (Centre of Defence and Security Management, Wits University.)"

South Africa's National Interest: African Security Review, 2010.

Perwita, Anak Agung Banyu, and Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Sari, Indah Puspita. *Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand*,
[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/22.%201102045147%20-%20Indah%20Puspita%20Sari%20\(11-05-18-02-31-58\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/22.%201102045147%20-%20Indah%20Puspita%20Sari%20(11-05-18-02-31-58).pdf). Accessed 27 Mei 2019.

Sauqi, Tiara. *Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Vietnam (2009 – 2013). Peranan Asean Senior Officials on Drugs Matters dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Vietnam (2009 – 2013)*,
<https://media.neliti.com/media/publications/31985-ID-peranan-asean-senior-officials-on-drugs-matters-asod-dalam-menanggulangi-drugs-t.pdf>. Accessed 2 April 2019.

Vuonga, Thu, et al. *Drug policy in Vietnam: A decade of change?*, p. 1.

Windle, James. *A Slow March from Social Evil to Harm Reduction: Drugs and Drug Policy in Vietnam*.